



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2020

PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas izin-Nya maka Laporan Kinerja Instansi (LKj) Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDM Kesehatan) Tahun 2020 telah selesai disusun.

LKj merupakan gambaran capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 yang disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdik SDM Kesehatan sebagai penjabaran prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menciptakan *Good Governance*. Selain itu, LKj sebagai evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, target kinerja Pusdik SDM Kesehatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Tahun 2020, serta sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

Pusdik SDM Kesehatan terus berupaya untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dan terus berupaya memperbaiki segala kekurangan yang tidak terlepas dari hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan LKj. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan LKj, saran, kritik, dan masukan sangat kami harapkan guna perbaikan LKj tahun yang akan datang. Semoga LKj dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 20 Januari 2021

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc

NIP. 196607221989031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pendidikan SDM Kesehatan (Pusdik SDM Kesehatan) Tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Menteri Kesehatan RI, khususnya kepada Kepala Badan PPSDMK.

LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pusdik SDM Kesehatan dan disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang tertuang dalam rencana kerja dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). LKj Pusdik SDM Kesehatan menyajikan informasi tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang di capai dari program yang mencakup uraian singkat organisasi, pencapaian tujuan dan sasaran, pencapaian target kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program pada tahun berjalan selama 5 (lima) tahun yang telah tertuang dalam Rencana Strategis serta menjelaskan tentang analisis penggunaan sumber daya.

Dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, Pusdik SDM Kesehatan telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, yaitu 1) Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK dengan target sebanyak 0 (tidak ada target) karena tahun ini dilakukan penyusunan kebijakan teknis sebagai dasar dalam pelaksanaan program serta lanjutan pelaksanaan kegiatan program bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan (RPL) Tahun Akademik 2019/2020, 2) Jumlah Prodi dan Lembaga

Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan dengan target sebanyak 52 prodi dan lembaga.

Capaian indikator kinerja Pusdik SDM Kesehatan berdasarkan perjanjian kinerja sebagai berikut: 1) Jumlah Penerima Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK yaitu sebanyak 0 dari target 0; 2) Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan, tercapai sebanyak 89 prodi dan lembaga (171,15 %) dari target 52 prodi dan lembaga yang terdiri dari a) penyesuaian secara kuantitas berupa penambahan jumlah prodi baru yaitu sebanyak 7 prodi Poltekkes Kemenkes, b) penyesuaian secara kualitas berupa prodi dan institusi yang meningkat status akreditasinya sebanyak 62 prodi (hasil akreditasi prodi/institusi yang dihitung dalam capaian kinerja adalah yang meningkat dari C ke B, B ke A), pengembangan pusat unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) di 5 Prodi Poltekkes Kemenkes dan pengembangan prodi ners rintisan kelas internasional (RKI) di 9 Poltekkes Kemenkes serta perluasan 6 kerjasama dengan mitra di dalam negeri.

Alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 mengalami efisiensi semula 65.949.801.000 menjadi 33.392.072.000 (alokasi anggaran sudah termasuk hibah langsung UNFPA sebesar Rp. 1.000.573.000). Efisiensi anggaran dilakukan akibat adanya pandemi covid 19 sehingga membuat pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan metode dan alokasi anggaran yang tersedia menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Adapun realisasi anggaran Rp. 30.427.715.633 (91,12 %) terdiri dari alokasi anggaran yang ada pada DIPA Pusdik SDM Kesehatan yaitu sebesar Rp. 20.230.771.000 sudah direalisasikan sebesar Rp. 18.931.352.191 (93,58 %) dan pada DIPA di 36 Poltekkes Kemenkes yaitu sebesar Rp. 13.161.301.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.496.363.442 (87,35 %).

Hasil kinerja ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Pusdik SDM Kesehatan khususnya dan Badan PPSDM Kesehatan umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Susunan Organisasi dan Tata Laksana.....	3
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan	7
B. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian dan Analisis Kinerja.....	20
B. Realisasi Anggaran	55
C. Pengukuran Pencapaian Kinerja	58
BAB IV PENUTUP.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan Rencana Strategis (Rencana Aksi) Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja K/L Tahun 2020	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	16
Tabel 2.4	Indikator Pendukung Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 (Berdasarkan RAK Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 - 2024)	17
Tabel 3.1	Sandingan Indikator RAK dan Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 (Sandingan RAK dan Perjanjian Kinerja)	21
Tabel 3.3	Definisi Operasional, Cara Perhitungan Indikator Jumlah Penerima Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK Tahun 2020	30
Tabel 3.4	Definisi Operasional, Cara Perhitungan Indikator Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2020	33
Tabel 3.5	Target dan Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan RAK Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	37
Tabel 3.6	Data SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	41
Tabel 3.7	Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Umur Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	43
Tabel 3.8	Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil	48
Tabel 3.9	Perbandingan Jumlah SDM dan Penggunaan Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	48

Tabel 3.10	Alokasi dan Realisasi Anggaran Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	55
Tabel 3.11	Alokasi dan Realisasi Anggaran dalam rangka Pencapaian Indikator Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	55
Tabel 3.12	Alokasi dan Realisasi Anggaran Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2020	56
Tabel 3.13	Alokasi dan Realisasi Anggaran Disandingkan dengan Output Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Sandingan Persentase Capaian Indikator Berdasarkan RAK Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2019 dan 2020	24
Grafik 3.2	Target dan Capaian Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2020	34
Grafik 3.3	Persentase SDM Berdasarkan Kelompok Umur Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	43
Grafik 3.4	Persentase SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	44
Grafik 3.5	Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	44
Grafik 3.6	Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi Pusdik SDM Kesehatan	4
Gambar 2.1	Bagan Keterkaitan Indikator RPJMN, Kemenkes, Badan PPSDM Kesehatan dengan Indikator Pusdik SDM Kesehatan	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Organisasi Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahunan Tingkat Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2020
Lampiran 3	Matrik Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020
Lampiran 4	Penghargaan Pusdik SDM Kesehatan
Lampiran 5	Daftar Inventaris Barang Milik Negara Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil terhadap pengukuran kinerja.

Pada dasarnya LKj disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja tahun berjalan, namun diharapkan ada kesinambungan dari tahun ke tahun sehingga terwujud kesinambungan kinerja dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Sejalan dengan hal tersebut LKj Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala Pusdik SDM Kesehatan dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

Adapun isi dari perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2020-2024, Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan 2020-2024 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020-2024. Dokumen perjanjian kinerja tersebut dievaluasi secara berkala sebagai tolak ukur atas pencapaian atau keberhasilan program sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKj Pusdik SDM Kesehatan dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pusdik SDM Kesehatan;
2. Umpan balik peningkatan kinerja Pusdik SDM Kesehatan;
3. Meningkatkan perencanaan program, kegiatan dan perencanaan organisasi Pusdik SDM Kesehatan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pusdik SDM Kesehatan;
5. Memberikan pemahaman dan penilaian pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pusdik SDM Kesehatan;
6. Menjadikan Pusdik SDM Kesehatan lebih akuntabel, sehingga penyelenggaraan organisasi lebih efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.

LKj Pusdik SDM Kesehatan secara umum disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian target indikator dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Pusdik SDM Kesehatan.

Adapun tujuan khusus penyusunan LKj adalah:

1. Menyampaikan pernyataan dari perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan
2. Menjelaskan hasil dari kinerja yang telah ditetapkan Pusdik SDM Kesehatan
3. Mengevaluasi perencanaan program, kegiatan dan perencanaan organisasi Pusdik SDM Kesehatan.
4. Menjelaskan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pusdik SDM Kesehatan
5. Menjelaskan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pusdik SDM Kesehatan
6. Menjelaskan kinerja yang lebih akuntabel, agar penyelenggaraan organisasi lebih efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya.

C. Susunan Organisasi dan Tata Laksana

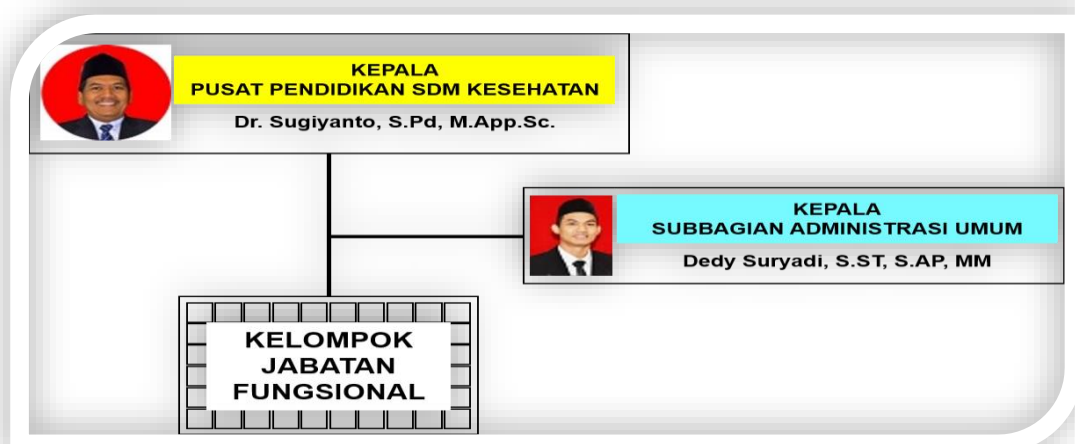
Seiring dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan sehingga Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah menjadi Permenkes Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga dilakukan penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Dalam Bab X bagian kelima pasal 223 Pusdik SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia

kesehatan yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
2. Pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, fasilitasi teknis dan penunjang penyelenggaraan, fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan
4. Pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Susunan Organisasi Pusdik SDM Kesehatan digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Pusdik SDM Kesehatan



D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKj Pusdik SDM Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan perihal latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan pelaporan, visi dan misi, susunan organisasi dan tata laksana Pusdik SDM Kesehatan serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan perencanaan dan perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan dalam bentuk tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target sesuai dengan Kebijakan dan Program Pusdik SDM Kesehatan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pusdik SDM Kesehatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Pusdik SDM Kesehatan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pencapaian target dan sasaran kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusdik SDM Kesehatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan serta langkah-langkah yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kinerja Pusdik SDM Kesehatan.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan :

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Untuk mencapai tatanan masyarakat di atas telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh

inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan terkait dengan Pengembangan SDM Kesehatan berada pada salah satu strategi penguatan sistem kesehatan yaitu pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada:

1. Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan);
2. Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
3. Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
5. Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
6. Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
7. Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar;
8. Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan

kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut Kementerian Kesehatan menyusun arah kebijakan dan strategi untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Program-program yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus kegiatan pembangunan kesehatan. Untuk itu, Badan PPSDM Kesehatan berupaya mendukung arah, kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar yang tertuang dalam Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 dan merupakan indikator tujuan Badan PPSDM Kesehatan : 1) Puskesmas tanpa dokter sebesar 0 %, 2) terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar sebesar 83%, 3) terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya sebesar 90%, 4) tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742 orang.

Indikator Badan PPSDM Kesehatan akan dicapai melalui program atau kegiatan : 1) Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2) Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3) Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 4) Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, 5) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, 6) Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan, 7) Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, 8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program.

Dalam mendukung pencapaian indikator Badan PPSDM Kesehatan, Pusdik SDM Kesehatan telah menetapkan arah kebijakan dan

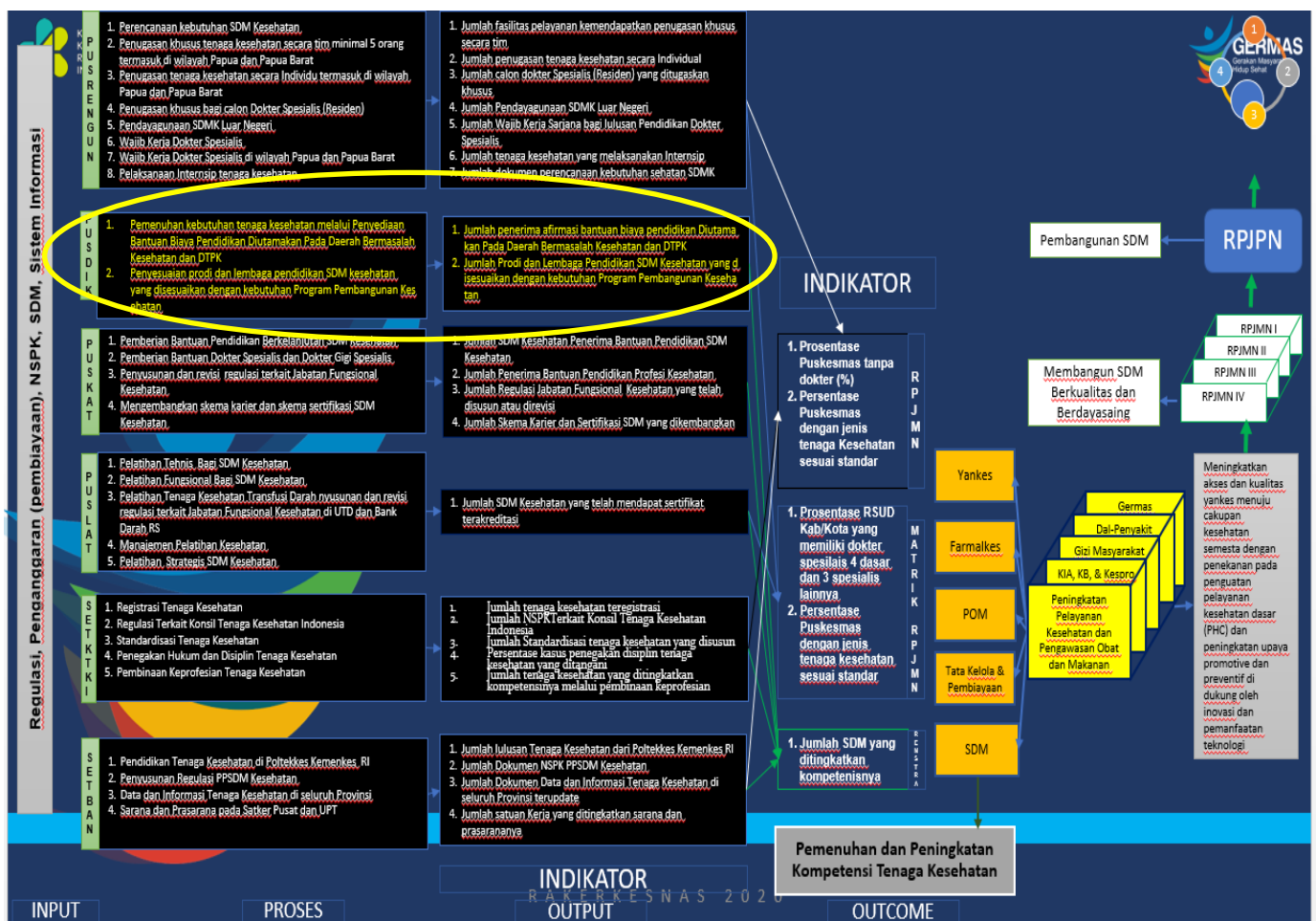
strategi Tahun 2020-2024 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Indikator pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan SDM Kesehatan adalah sebagai berikut :

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)/PROYEK	INDIKATOR	TARGET					SATUAN	LOKASI
		2020	2021	2022	2023	2024		
PP : Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan								
KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan								
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan								
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	0	500	1000	1500	1500	Orang	Pusat dan Poltekkes Kemenkes
Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	52	104	156	208	260	Prodi dan Lembaga	Pusat dan Poltekkes Kemenkes

Berdasarkan tabel di atas, untuk tahun 2020 Pusdik SDM Kesehatan melakukan penyiapan regulasi terkait indikator program afirmasi yang menyesuaikan indikator RPJMN yang baru terbit pada tahun 2020 sehingga pelaksanaan program baru dimulai pada tahun 2021 dengan target sebanyak 500 orang.

Dalam rangka menjabarkan arah kebijakan dan sasaran strategis RPJMN 2020-2024, Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan, secara vertikal dan horizontal dengan tujuan menciptakan keselarasan dalam organisasi seperti pada bagan keterkaitan di bawah ini:

Gambar 2.1 Bagan Keterkaitan Indikator RPJMN, Kemenkes, Badan PPSDM Kesehatan dengan Indikator Pusdik SDM Kesehatan



Untuk mendukung sasaran tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 1.500 orang.
 - b. Penyesuaian pendidikan SDM Kesehatan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas pada tahun 2024 yaitu sebanyak 206 prodi dan lembaga.
2. Sasaran
 - a. Penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi lulusan SMA/ sederajat dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes tingkat akhir yang diutamakan dari daerah bermasalah kesehatan dan DTPK
 - b. Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan.
3. Indikator Kinerja Pusdik SDM Kesehatan
 - a. Berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020 - 2024 pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan
Berdasarkan Rencana Strategis (Rencana Aksi) Pusdik SDM Kesehatan
Tahun 2020 - 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target (per Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	0	500 orang	1.000 orang	1.500 orang	1.500 orang

Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)	52 prodi dan lembaga	104 prodi dan lembaga	156 prodi dan lembaga	208 prodi dan lembaga	260 prodi dan lembaga
--	---	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- b. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2020 pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan
Berdasarkan RKP, Renja K/L Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	0
Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)	52 prodi dan lembaga

c. Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan Pusdik SDM Kesehatan dan mendukung pencapaian sasaran, maka ditetapkan strategi berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pusdik SDM Kesehatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan/pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan didasarkan atas kajian kebutuhan pendidikan tenaga

kesehatan berbasis data dan informasi pendidikan tenaga kesehatan yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan standar nasional pendidikan tinggi.

- 2) Pengembangan sistem pembelajaran pendidikan SDM Kesehatan melalui penyusunan dan pengembangan pedoman, petunjuk teknis (juknis) ataupun petunjuk pelaksanaan (juklak) pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 3) Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan melalui peningkatan kualitas pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta penguatan implementasi sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.
- 4) Kerjasama dengan pemangku kepentingan dan mitra pendidikan perlu dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan serta dalam pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi tenaga kesehatan untuk mewujudkan mutu pendidikan kesehatan yang berkualitas, berdaya saing dan unggul.
- 6) Peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan atas kajian kebutuhan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berbasis data dan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan metodologi dan teknologi yang inovatif, kreatif dan tepat guna dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang berkesinambungan.
- 7) Peningkatan Mutu dan pengembangan pengadaan SDM Kesehatan melalui akreditasi program studi dan institusi

pendidikan serta sertifikasi dosen. Evaluasi pendidikan dilakukan guna pengembangan pengadaan SDM Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan program/pelayanan kesehatan dan perkembangan IPTEK. Akreditasi diselenggarakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu pendidikan tenaga kesehatan.

- 8) Peningkatan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK.
- 9) Peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan, dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan kesehatan yang didasarkan pada sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dan pangkalan data perguruan tinggi Kemdikbud.
- 10) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainnya pada program pendidikan SDM Kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai), pengelolaan, pembinaan & pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis & kegiatan lainnya.

B. Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai Kepala Pusdik SDM Kesehatan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan dalam satu tahun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Perjanjian Kinerja mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Pada tahun 2020 perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan di tanda tangani oleh Kepala Pusdik SDM Kesehatan dengan Plt. Kepala Badan PPSDM Kesehatan pada tanggal 28 November 2019, namun adanya pandemi covid 19 menyebabkan alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan mengalami efisiensi sehingga terjadi perubahan alokasi anggaran pada Pusdik SDM Kesehatan. Untuk itu dilakukan revisi perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan pada tanggal 13 November 2020 (lampiran 1).

2. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur
- b) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kinerja Pusdik SDM Kesehatan tahun 2020 yang telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja, dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah	Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	0

bermasalah kesehatan dan DTPK		
Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)	52 prodi dan lembaga

3. Kegiatan Pendukung Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusdik SDM Kesehatan
- Dalam pencapaian IKK didukung dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis dan dukungan manajemen yang tertuang dalam RAK Pusdik SDM Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Pendukung Perjanjian Kinerja
Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
A.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyesuaian prodi	1	dokumen
		Jumlah dokumen kebijakan afirmasi bantuan biaya pendidikan dalam rangka penugasan khusus diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	4	kebijakan teknis
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	17	prodi
		Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan	1	dokumen

		Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima bantuan biaya pendidikan : • Di Pusdik SDMK : 1.391 orang • Di Poltekkes Kemenkes (realokasi) : 4.833 orang	6.224	orang
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	10	Orang
		Jumlah dokumen Pembinaan Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Akses Pelayanan Mutu Kesehatan	1	Dokumen
		Monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	2	Dokumen
B.	Kebijakan teknis pendidikan dan pembinaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan	6	Dokumen
		Jumlah prodi dan institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas pembelajaran	38	Institusi
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	9	Prodi
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas penelitian	38	Institusi
		Jumlah dokumen penguatan kualitas pengabdian masyarakat	10	pengabmas unggulan
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan program kemahasiswaan	38	Institusi
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	60	Orang
C.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan sumber daya	Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi akreditasi pendidikan SDM kesehatan	1	Dokumen

	manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah program studi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya	20	prodi dan institusi
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan akreditasi Poltekkes Kemenkes	1	Dokumen
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	1.450	Orang
		Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM kesehatan	9	Dokumen
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan implementasi SPMI	38	Institusi
D.	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan SDM kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	9	Unit
		Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	139	Unit
		Jumlah dokumen rencana program dan penyusunan rencana anggaran	2	Dokumen
		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	2	Dokumen
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1	Dokumen
		Jumlah pengelolaan kepegawaian	68	Orang
		Jumlah layanan umum, layanan rumah tangga dan perlengkapan	1	Layanan
		Jumlah realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	90	Persen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian dan Analisis Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Pada periode Renstra 2015 – 2019, Pusdik SDM Kesehatan menetapkan 2 indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu 1) jumlah prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik, 2) jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima program bantuan biaya Pendidikan. Capaian IKK tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target dan Capaian Pusdik SDM Kesehatan
Tahun 2015 - 2019

Sasaran Strategis	Indikator	Target (per Tahun)									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Akreditasi Program Studi Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik	153 ^{k)} prodi	165 ^{k)} prodi	213 ^{k)} prodi	247 ^{k)} prodi	295 ^{k)} prodi	314 ^{k)} prodi	321 ^{k)} Prodi	359 ^{k)} prodi	351 ^{k)} prodi	412 ^{k)} prodi
Program bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum D-III	Jumlah Tenaga Kesehatan yang belum DIII penerima program bantuan biaya pendidikan	-	-	-	-	16.190 ^{k)} orang	15.388 ^{k)} orang	30.620 ^{k)} orang	28.390 ^{k)} orang	37.819 ^{k)} orang	34.628 ^{k)} orang

Seiring dengan perkembangan arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan yang tertuang strategis Kementerian Kesehatan yang salah satu sasaran adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar yang dilaksanakan melalui strategi:

- a. Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar;
- b. Pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai

standar;

- c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian penyakit);
- d. Afiriasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK;
- e. Pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan standar jumlah nakes dengan pendekatan insentif yang memadai dan perbaikan regulasi;
- f. Meningkatkan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu, posbindu) dan memberikan reward yang memadai sesuai kinerja yang ditetapkan.

Untuk itu, Pusdik SDM Kesehatan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020 – 2024, Renja K/L Tahun 2020 dan perjanjian kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020. Capaian IKK tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020
(Sandingan RAK, Renja K/L dan Perjanjian Kinerja)

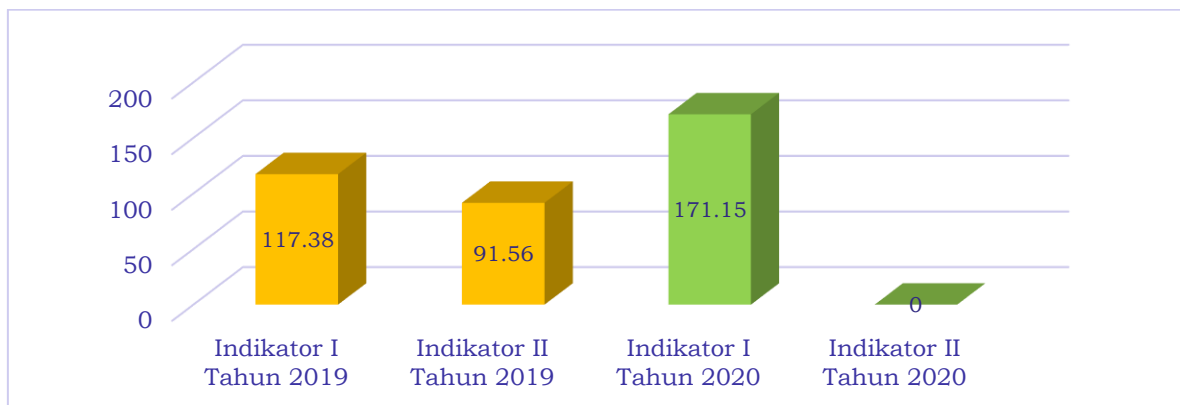
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	Kegiatan yang dilakukan
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah Penerima Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	0	0	Target dan capaian pada indikator jumlah penerima afiriasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK yaitu 0. Untuk mendukung indikator ini kegiatan yang dilakukan tahun 2020 : penyusunan regulasi/ kebijakan teknis sebagai dasar dalam pelaksanaan program yang meliputi 4 dokumen yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Program Afiriasi, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Afiriasi, Petunjuk Teknis Pembiayaan Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Juknis Rekrutmen Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)	52 prodi dan lembaga	89 prodi dan lembaga	Telah tercapai sebanyak 89 prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan, yaitu 1) penyesuaian secara kuantitas berupa penambahan jumlah prodi baru yaitu sebanyak 7 prodi Poltekkes Kemenkes, 2) penyesuaian secara kualitas berupa prodi dan institusi yang meningkat status akreditasinya sebanyak 62 prodi (hasil akreditasi prodi/institusi yang dihitung dalam capaian kinerja adalah yang meningkat dari C ke B, B ke A), pengembangan pusat unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) atau center of excellence (CoE) di 5 Prodi Poltekkes Kemenkes dan pengembangan prodi ners rintisan kelas internasional (RKI) di 9 Poltekkes Kemenkes serta perluasan 6 kerjasama dengan mitra di dalam negeri. Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target indikator sebagai berikut : 1. Penyesuaian secara kuantitas (penambahan prodi baru Poltekkes Kemenkes) melalui, penyusunan telaah dan rekomendasi terhadap usulan prodi-prodi baru dalam rangka pemberian izin pembukaan prodi baru Poltekkes Kemenkes. 2. Penyesuaian secara kualitas dengan cara mendorong PT bidang kesehatan dan prodi untuk meningkatkan status akreditasi khususnya untuk mencapai akreditasi unggul; pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK), pengembangan kelas Internasional; dan perluasan kerjasama dengan mitra di dalam dan di luar negeri melalui : a. Pendampingan dan <i>coaching clinic</i> bersama LAM PT Kes bagi prodi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi C dan melakukan pembinaan bagi prodi-prodi yang berpotensi meningkat status akreditasinya (B menjadi A), sinkronisasi data pada PD Dikti, b. Pendampingan teknis dalam rangka pengembangan pusat unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) dengan menghadirkan nara sumber dari ITB, IPB dan UNS sebagai pengampu PUI-PK di perguruan tinggi negeri untuk memberikan masukan terhadap progress kegiatan mulai dari kelembagaan, komersialisasi dan <i>academic excellent</i> yang bertujuan agar Poltekkes Kemenkes memiliki keunggulan dan menjadi pusat unggulan bahkan sebagai pusat rujukan nasional. c. Pengembangan Rintisan Kelas Internasional pada prodi Ners Poltekkes Kemenkes berupa pendampingan dan evaluasi implementasi RKI di 10 Poltekkes Penyelenggara berupa pengisian self asesmen dan rapat koordinasi yang membahas dukungan pimpinan Poltekkes dlm implementasi, kemampuan bhs
--	---	----------------------	----------------------	---

				inggris dosen RKI, jumlah kelas RKI, jumlah mahasiswa RKI, dan kerjasama internasional. d. Pengembangan Kerja Sama Pendidikan Tenaga Kesehatan dalam bentuk fasilitasi penyusunan MoU dengan Universitas, RS dan lembaga lainnya dalam rangka perluasan kerjasama dengan mitra baik di dalam maupun di luar negeri. e. Selain fasilitasi dalam rangka penyesuaian prodi secara langsung, Pusdik SDM Kesehatan juga memberikan penguatan-penguatan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi bagi prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes untuk memenuhi standar nasional pendidikan dari sisi akademik dan non akademik, yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan bermutu kepada masyarakat antara lain : 1) Pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas penelitian bagi Poltekkes Kemenkes yang memiliki hasil penelitian masih rendah. Kegiatan ini melibatkan reviewer nasional untuk memfasilitasi dalam penyusunan protokol penelitian. Selain itu Pusdik SDM Kesehatan melakukan workshop pendampingan dan percepatan akreditasi jurnal untuk 38 Poltekkes Kemenkes. 2) Fasilitasi pengabdian masyarakat melalui kegiatan seleksi dan penetapan peserta pengabdian masyarakat kategori unggulan nasional program pengembangan desa sehat untuk tahun pelaksanaan 2021. 3) Persiapan uji kompetensi (ukom) bagi Poltekkes Kemenkes berupa penyusunan soal-soal ukom dalam bentuk CBT dan pembiasaan penggunaan soal-soal ukom pada mahasiswa. 4) Pemilihan mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes tingkat nasional yang bertujuan untuk mendorong Poltekkes Kemenkes mengembangkan budaya akademik dengan memfasilitasi mahasiswa berprestasi di Poltekkes Kemenkes untuk berkompetisi di tingkat nasional. Aspek penilainnya meliputi tes psikologi, bahasa inggris, karya tulis dan karya unggulan. 5) Peningkatan kemampuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Poltekkes Kemenkes seperti penguatan metodologi
--	--	--	--	--

Bila disandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator Pusdik SDM Kesehatan sebagai berikut :

Grafik 3.1 Sandingan Persentase Capaian Indikator
Berdasarkan RAK Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2019 dan 2020



Keterangan:

Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Capaian	%
Indikator I Tahun 2019	Jumlah prodi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik	351 ^{k)} prodi	412 ^{k)} prodi	117,38
Indikator II Tahun 2019	Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima program bantuan biaya pendidikan	37.819 ^{k)} orang	34.628 ^{k)} Orang	91,56
Indikator I Tahun 2020	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)	52 prodi dan lembaga	89 prodi dan lembaga	171,15
Indikator II Tahun 2020	Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	-	-	-

Capaian indikator Pusdik SDM Kesehatan tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dikarenakan indikator pada tahun 2019 berbeda dengan tahun 2020 yang merupakan indikator baru.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan dalam pencapaian IKK sebagai berikut :

- a. Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK dengan target 0. Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (PADINAKES) adalah program keberpihakan pemerintah yang diatur secara khusus untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada siswa lulusan SMA sederajat yang berasal Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan beberapa wilayah tertentu dengan permasalahan kesehatan dan/atau mahasiswa pada tahun terakhir yang akan ditempatkan di DTPK dan daerah dengan permasalahan kesehatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara khusus tujuan dari PADINAKES adalah 1) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lulusan SMA sederajat untuk putra-putri Indonesia dan diutamakan yang berasal dari Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan dan Daerah Bermasalah Kesehatan, untuk memperoleh pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes, 2) mendapatkan calon mahasiswa baru program afirmasi melalui seleksi khusus yang dapat diprediksi mampu beradaptasi dengan cepat dan menyelesaikan studinya sesuai ketentuan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes, 3) menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas lulusan Poltekkes Kemenkes dari putra-putri Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional dan daerahnya melalui pemenuhan tenaga di Puskesmas, 4) menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dan/atau mahasiswa yang akan ditempatkan di daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan dan Daerah Bermasalah Kesehatan.

Pelaksanaan PADINAKES secara nasional dirancang dalam beberapa tahapan, dimulai dari tahapan diseminasi informasi, pendataan dan pendaftaran, rekrutmen, seleksi/ujian, pembekalan, mobilisasi, matrikulasi, registrasi, monitoring dan evaluasi. Pemerintah menyediakan biaya pendidikan, biaya hidup, dan pembinaan atau pembimbingan belajar secara khusus, agar mahasiswa peserta PADINAKES dapat menyelesaikan pendidikan tinggi dengan tuntas dan hasil yang baik di Perguruan Tinggi terbaik.

Saat ini sedang dilakukan persiapan untuk pelaksanaan program afirmasi PADINAKES seperti penyusunan regulasi/kebijakan termasuk pedoman dan juknis pelaksanaan. Penerimaan/ rekrutmen mahasiswa PADINAKES baru akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga pada tahun 2020 kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan kebijakan teknis seperti Peraturan Menteri Kesehatan Program Afirmasi, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Afirmasi, Petunjuk Teknis Pembiayaan Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Juknis Rekrutmen Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program Pendidikan afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK.

Untuk program afirmasi bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum D-III telah berakhir pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 masih dilaksanakan lanjutan proses belajar mengajar (PBM) untuk semester II dan III di institusi penyelenggaraan program (Poltekkes Kemenkes dan institusi swasta) dengan target sebanyak 6.224 orang

serta dalam mengakomodir pelaksanaan tersebut pendanaan/pembiayaan nya telah di anggarkan dalam RKA K/L Pusdik SDM Kesehatan tahun 2020. Capaian program bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum D-III T.A 2019/2020 (Program percepatan pendidikan tenaga kesehatan/RPL) pada institusi program percepatan (institusi swasta dan Poltekkes Kemenkes) yaitu sebanyak 6.125 orang dari target sebanyak 6.224 orang (98,41 %).

- b. Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan dengan target 52 prodi dan lembaga. Penetapan indikator tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasyankes. Untuk itu, Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan melakukan pembinaan secara teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya Poltekkes Kemenkes mulai dari perencanaan pendidikan, pengawasan mutu, distribusi semua jenis tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dalam jenis, jumlah, jenjang pendidikan, mutu serta karakter yang baik dengan mengacu pada PP Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan. Berkaitan dengan pengadaan tenaga kesehatan pada BAB III pasal 11-15 dijelaskan bahwa pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan program studi. Untuk menjamin mutu pendidikan tinggi bidang kesehatan Menteri (menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi melakukan pembinaan terhadap perguruan tinggi dan program studi baik secara akademis maupun teknis.

Saat ini terdapat 20 jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan di seluruh Indonesia termasuk 38 Poltekkes Kemenkes. Adapun rincian jenis pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dikelompokkan sebagai berikut: a) tenaga keperawatan: keperawatan, keperawatan gigi; b) tenaga kebidanan: kebidanan; c) tenaga kefarmasian: farmasi, analisa farmasi dan makanan; d) tenaga gizi: gizi; e) tenaga kesehatan lingkungan: kesehatan lingkungan; f) tenaga keterampilan fisik: fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, akupunktur; g) tenaga keteknisian medis: perekam medis dan informasi kesehatan, teknik gigi; h) tenaga teknik biomedika: analisis kesehatan, teknik elektromedik, ortotik prostetik, teknik radiodiagnostik dan radioterapi; i) tenaga kesehatan tradisional: jamu. Dari pengelompokkan tenaga kesehatan di atas, jenis pendidikan tenaga kesehatan yang diselenggarakan di 38 Poltekkes Kemenkes seluruh Indonesia sebanyak 21 jenis yang tersebar di 500 prodi (D-III : 293, D-IV/Sarjana Terapan : 153, D-III PJJ : 4, Profesi : 46, S2 Terapan : 4) dengan jumlah mahasiswa sebanyak 101.585 orang dan lulusan yang dihasilkan dari Poltekkes Kemenkes pada tahun 2019 sebanyak 37.725 orang. Sinkronisasi antara kebutuhan program pembangunan kesehatan dengan lulusan tenaga kesehatan yang ada melalui penyesuaian pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas sangat diperlukan.

Sejalan dengan hal tersebut dilakukan penyesuaian secara kuantitas berupa penambahan (jumlah dan jenis) program studi, pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru,

pembatasan pembukaan program studi baru, serta penutupan program studi yang sudah jenuh, disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan. Sedangkan penyesuaian secara kualitas dilakukan dengan cara mendorong perguruan tinggi bidang kesehatan dan program studi untuk mengembangkan Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) dan pengembangan kelas internasional di institusi pendidikan tenaga kesehatan khususnya Poltekkes Kemenkes, Peningkatan Status Akreditasi menjadi kebutuhan untuk mendukung prodi dan lembaga yang disesuaikan dengan pembangunan kesehatan.

Selain itu, salah satu tujuan dari MEA adalah bahwa negara anggota ASEAN akan mengalami pertumbuhan yang setara. Jika tenaga kesehatan di Indonesia tidak mampu menyeimbangkan kualitas tenaga kerja yang ada di ASEAN maka sangat dikhawatirkan tenaga kerja terampil dari luar akan masuk ke Indonesia dan mengalahkan sumber daya kesehatan negara sendiri. Upaya penyiapan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing global salah satunya dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan mitra baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun analisa terhadap ketercapaian indikator Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Analisa Capaian Indikator Jumlah Penerima Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK

Tabel 3.3 Definisi Operasional, Cara Perhitungan Indikator Jumlah Penerima Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Target	Capaian
Jumlah Penerima Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah penerima bantuan biaya pendidikan afiriasi diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah peserta penerima bantuan biaya pendidikan afiriasi diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	0	0

Berdasarkan tabel 3.3 diatas telah ditetapkan indikator kinerja Pusdik SDM Kesehatan dengan jumlah target 0 untuk tahun 2020. Pada tahun ini masih dilakukan penyusunan regulasi/kebijakan teknis sebagai dasar dalam penyelenggaraan program tersebut. Adapun 4 kebijakan teknis yang disusun yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Program Afiriasi, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Afiriasi, Petunjuk Teknis Pembiayaan Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Juknis Rekrutmen Program Afiriasi Pendidikan Tenaga Kesehatan. Serta lanjutan pelaksanaan program percepatan kualifikasi pendidikan RPL.

Dalam penyusunan kebijakan teknis tersebut Pusdik SDM Kesehatan melakukan tahapan kegiatan yaitu 1) penyusunan draft Permenkes melalui pertemuan secara daring yang dihadiri oleh Sekretariat dan Pusat-Pusat di lingkungan

Badan PPSDM Kesehatan serta Poltekkes Kemenkes, 2) dilanjutkan pembahasan di Biro Hukor Kemenkes dengan mengundang bagian Hukormas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Pusat-Pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, 3) harmonisasi draft Permenkes dengan lintas sektor yaitu Kemenkum HAM, Kemendagri, KemenPAN RB dan BKN pada tanggal 21 Desember 2020. Saat ini draft Permenkes Program Afirmasi masih dalam proses pengadministrasian di Biro Hukor Kemenkes, untuk disahkan Menteri Kesehatan. Sedangkan untuk 3 Juknis Program Afirmasi kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dan pembahasan yang melibatkan perwakilan 10 Poltekkes Kemenkes yang ditunjuk dan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Pusat-Pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

Sampai dengan periode SAKIP, 4 dokumen kebijakan teknis tersebut masih dalam bentuk draft menunggu pengesahan Permenkes. Pusdik SDM Kesehatan terus berkoordinasi secara intensif agar dapat terselesaikan, sehingga dapat segera digunakan untuk pelaksanaan di tahun 2021.

Untuk kegiatan lanjutan pelaksanaan program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan yang belum D-III (RPL) telah tercapai sebanyak 6.125 orang dari target sebanyak 6.224 orang (98,21 %). Sebanyak 121 orang mengundurkan diri dengan alasan sakit, meninggal dan akademik. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah proses belajar mengajar peserta pada prodi keperawatan, kebidanan, farmasi, teknik laboratorium medik, gizi, keperawatan gigi, teknologi bank darah, dan kesling (2 semester) dan prodi Rekam Medik dan Informatika Kesehatan (3 semester) di

institusi penyelenggara program percepatan (institusi swasta dan Poltekkes Kemenkes). Dalam pencapaian target program percepatan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan (RPL), Pusdik SDM Kesehatan telah membuat surat ke institusi penyelenggara program dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan mengupayakan agar jumlah peserta program percepatan T.A 2019/2020 tidak berkurang serta melakukan rapat monev secara daring, sebagai berikut:

- 1) Surat Kepala Pusdik SDM Kesehatan Nomor DP.01.03/1/02007/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Percepatan Realisasi Anggaran Bantuan Biaya Pendidikan.
- 2) Surat Kepala Pusdik SDM Kesehatan Nomor DP.01.03/1/3052/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Permohonan Laporan Realisasi Anggaran dan Percepatan Realisasi Anggaran Program Percepatan.

Tindak lanjut ke depan yaitu : setelah 4 dokumen kebijakan teknis ditanda tangani segera melakukan sosialisasi dan rekrutmen peserta program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK serta berkoordinasi dengan Poltekkes Kemenkes penyelenggara dan Dinas Kesehatan terkait (mengacu pada Permenkes dan Juknis Afirmasi).

- b. Analisa Capaian Indikator Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)

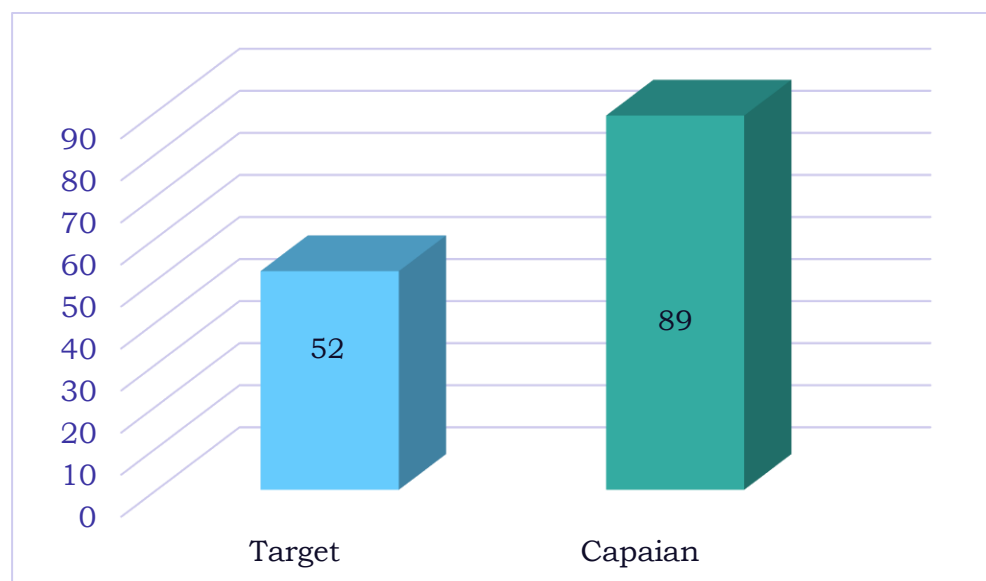
Tabel 3.4 Definisi Operasional, Cara Perhitungan Indikator
Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan
Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan
Kesehatan Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Target	Capaian
Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)	Jumlah prodi dan atau lembaga pendidikan bidang kesehatan yang disesuaikan baik secara kuantitas dan kualitas dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan	Jumlah prodi dan atau lembaga pendidikan bidang kesehatan yang disesuaikan baik secara kuantitas dan kualitas dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan • Penyesuaian secara kuantitas berupa penambahan (jumlah dan jenis) program studi, pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru, pembatasan pembukaan program studi baru, serta penutupan program studi yang sudah jenuh, disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan. • Penyesuaian secara kualitas dilakukan dengan cara mendorong perguruan tinggi bidang kesehatan dan program studi di dalamnya untuk meningkatkan status akreditasinya khususnya untuk mencapai akreditasi unggul; pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK),	52 prodi dan lembaga	89 Prodi dan lembaga

		pengembangan kelas Internasional; dan perluasan kerjasama dengan mitra di dalam dan di luar negeri		
--	--	--	--	--

Capaian jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif) yaitu sebanyak 89 prodi dan lembaga (171,15 %) dari target sebanyak 52 prodi dan lembaga seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.2 Target dan Capaian Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2020



Data capaian terdiri dari 1) penyesuaian secara kuantitas berupa penambahan jumlah prodi baru yaitu sebanyak 7 prodi Poltekkes Kemenkes, 2) penyesuaian secara kualitas berupa prodi dan institusi yang meningkat status akreditasinya sebanyak 62 prodi (hasil akreditasi prodi/institusi yang dihitung dalam capaian kinerja adalah yang meningkat dari C ke B, B ke A), pengembangan pusat

unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) atau *Center of Excellence* (CoE) di 5 Prodi Poltekkes Kemenkes dan pengembangan prodi ners rintisan kelas internasional (RKI) di 9 Poltekkes Kemenkes serta perluasan 6 kerjasama dengan mitra di dalam negeri.

Jumlah capaian sudah melebihi dari target yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan terjadi peningkatan capaian pada prodi yang meningkat status akreditasinya. Pada tahun 2020 jumlah prodi Poltekkes Kemenkes yang melakukan reakreditasi cukup banyak, namun sesuai peta pelaksanaan akreditasi prodi yang diperhitungkan meningkat status akreditasi hanya 20 prodi/institusi, pada kenyataannya melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Selain itu, penggunaan borang akreditasi 7 kriteria menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya prodi Poltekkes Kemenkes yang melakukan reakreditasi pada tahun 2020 (agar tidak masuk dalam penilaian akreditasi borang 9 kriteria) walaupun prodi tersebut belum habis masa berlaku akreditasinya. Dan adanya proses pembinaan baik yang dilaksanakan prodi dan direktorat Poltekkes Kemenkes maupun di tingkat pusat, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara komperenshif sebagai upaya untuk meningkatkan status akreditasi.

Tindak lanjut ke depan yaitu 1) mematangkan pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes menjadi Institut Kesehatan Nasional (IKN) agar dapat mendirikan prodi-prodi yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dengan tetap memperhatikan kajian dan peta pengembangan pendidikan tenaga kesehatan, 2) menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka Peningkatan Peran PTS dan PTK untuk Produksi Prodi Langka dan Pembatasan Prodi Jenuh,

serta Penambahan/Pembatasan Kuota Mahasiswa Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, 3) menyusun kajian terkait Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis, 4) melakukan pembinaan prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes dalam hal peningkatan status akreditasi, pengembangan pusat unggulan IPTEKS Poltekkes Kemenkes, pengembangan rintisan kelas internasional untuk prodi lainnya di Poltekkes Kemenkes dan perluasan kerjasama dengan mitra tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri agar kualitas lulusan tenaga kesehatan yang dihasilkan dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan.

c. Analisa Capaian Indikator Pendukung Perjanjian Kinerja Berdasarkan RAK Pusdik SDM Kesehatan

Pelaksanaan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan utamanya adalah untuk mendukung indikator yang tertuang dalam RAK Pusdik SDM Kesehatan seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Target dan Capaian Indikator Kinerja
Berdasarkan RAK Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Output
A.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyesuaian prodi	1 dokumen	1 dokumen	Pedoman penyesuaian prodi
		Jumlah dokumen kebijakan afirmasi bantuan biaya pendidikan dalam rangka penugasan khusus diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	4 kebijakan teknis	4 kebijakan teknis	Peraturan Menteri Kesehatan Program Afirmasi, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Afirmasi, Petunjuk Teknis Pembiayaan Program Afirmasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Juknis Rekrutmen Program Afirmasi

					Pendidikan Tenaga Kesehatan
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	17 prodi	18 prodi	Secara kuantitas yaitu : pengembangan prodi baru sebanyak 7 prodi dan secara kualitas yaitu pengembangan center of excellence (CoE) di 5 prodi Poltekkes Kemenkes dan pengembangan RKI di 9 prodi Ners Poltekkes Kemenkes serta perluasan 6 kerjasama dengan mitra di dalam negeri
		Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	Kajian <i>Competency Need Assessment</i> pendidik dan tenaga kependidikan
		Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima bantuan biaya pendidikan : • Di Pusdik SDM Kesehatan : 1.391 orang • Di Poltekkes Kemenkes (realokasi) : 4.833 orang	6.224 orang	6.125 orang	Rekapitulasi data peserta bantuan biaya pendidikan yang belum D-III
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	10 orang	123 orang	123 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya dalam pengembangan IKN Poltekkes Kemenkes
		Jumlah dokumen Pembinaan Wilayah Dalam Rangka	1 dokumen	1 dokumen	Laporan pelaksanaan pembinaan wilayah

		Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Akses Pelayanan Mutu Kesehatan			dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan dan akses pelayanan mutu kesehatan
		Monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	2 dokumen	2 dokumen	1. Hasil evaluasi Penyelenggaraan Program Percepatan (RPL) 2. Hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama di Poltekkes Kemenkes
B.	Kebijakan teknis pendidikan dan pembinaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan	6 dokumen	14 dokumen	Kurikulum D-IV audiologi, D-III optometri, D-III kardiovaskuler, D-III sanitasi, bahan ajar, pedoman pengajuan insentif Poltekkes Kemenkes, 9 bahan ajar terstandar nasional
		Jumlah prodi dan institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas pembelajaran	38 institusi	38 institusi	38 institusi yang difasilitasi dalam pengembangan pembelajaran daring melalui Sistem Pembelajaran Online Poltekkes Kemenkes (SPOKES) dan VILEP
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	9 prodi	9 prodi	Prodi ners rintisan kelas internasional (RKI) di 9 Poltekkes Kemenkes
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas penelitian	38 institusi	38 institusi	38 institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas penelitian melalui Fasilitasi/ Workshop Sertifikasi Reviewer Penelitian serta publikasi ilmiah
		Jumlah dokumen penguatan kualitas pengabdian masyarakat	10 pengabmas unggulan	10 pengabmas unggulan	SK penetapan 10 judul pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes

		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan program kemahasiswaan	38 institusi	38 institusi	38 institusi yang mengikuti penyelenggaraan edu health fair tahun 2020
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	60 orang	310 orang	310 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya dalam penguatan Metodologi Pembelajaran era 4.0 dan penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran daring dan pemanfaatan media pembelajaran)
C.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi akreditasi pendidikan SDM kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	Pedoman mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes
		Jumlah program studi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya	20 prodi dan institusi	62 prodi	Rekapitulasi jumlah prodi yang meningkat status akreditasinya
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan akreditasi Poltekkes Kemenkes	1 dokumen	1 dokumen	Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan tridharma
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	1.450 orang	1.550 orang	1.550 pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya dalam
		Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM kesehatan	9 dokumen	9 dokumen	1 dokumen Juknis Sipenmaru, 8 standar laboratorium (D.III Kesehatan Lingkungan, Farmasi Dan Gizi, Keperawatan, Kebidanan, Jamu, Okupasi Terapi Dan Orthotik Prostetik)
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam	38 institusi	38 institusi	38 institusi yang difasilitasi dalam :

		penguatan implementasi SPMI			1. Workshop Implementasi SPMI Poltekkes Kemenkes 2. Pelaksanaan Try Out Uji Kompetensi Pendidikan Tenaga Kesehatan 3. Persiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Program D-III dan D-IV Pendidikan Tenaga Kesehatan
D.	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan SDM kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	9 unit	9 unit	9 unit peralatan fasilitas perkantoran
		Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	139 unit	139 unit	20 unit antivirus, 4 unit kartu memori, 6 unit converter HDMI to VGA, 4 unit speaker, 2 unit tripod kamera, 35 unit eksternal harddisk, 7 unit webcam, 5 unit headphone, 12 unit laptop, 20 unit microsoft office, 4 unit alat perekam suara, 4 unit microphone, 1 unit green screen, 1 unit document scanner untuk analisis soal, 2 unit digital sign (media publikasi), 12 unit tablet android untuk EFS
		Jumlah dokumen rencana program dan penyusunan rencana anggaran	2 dokumen	2 dokumen	DIPA dan POK revisi Tahun Anggaran 2020
		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	2 dokumen	2 dokumen	Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1 dokumen	1 dokumen	Laporan keuangan Tahunan

		Jumlah pengelolaan kepegawaian	68 orang	68 orang	68 orang yang difasilitasi dalam kegiatan pengelolaan kepegawaian
		Jumlah layanan umum, layanan rumah tangga dan perlengkapan	1 layanan	1 layanan	Laporan pelaksanaan kegiatan layanan umum, layanan rumah tangga dan perlengkapan
		Jumlah realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	90 %	90,76 %	Realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor

d. Penggunaan Sumber Daya Pusdik SDM Kesehatan

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. SDM di Pusdik SDM Kesehatan sebagai penggerak utama program dan kegiatan memiliki beragam potensi dan kompetensi dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran kinerja Pusdik SDM Kesehatan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) pada tanggal 31 Desember 2020, Pusdik SDM Kesehatan memiliki jumlah pegawai sebanyak 69 orang dengan karakteristik SDM Pusdik SDM Kesehatan akan diuraikan pada tabel dan grafik berikut berdasarkan jabatan, kelompok umur, jenis kelamin, golongan dan pendidikan terakhir.

Tabel 3.6 Data SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan
Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020

No	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Pusat	Jabatan Struktural	1
2	Kepala Bidang	Jabatan Struktural	3
3	Kepala Sub Bidang/Bagian	Jabatan Struktural	7

4	Perencana	Jabatan Fungsional Umum	1
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Jabatan Fungsional Teknis	4
6	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Jabatan Fungsional Teknis	6
7	Analisis Kebijakan		15
8	Pengadministrasian Keuangan		3
9	Analisis Keuangan		2
10	Pengelola Data		5
11	Analisis Kepegawaian Ahli	Jabatan Fungsional Umum	1
12	Analisis Kepegawaian		1
13	Arsiparis		7
14	Pranata Komputer Ahli / Analisis Sistem Informasi		1
15	Bendahara		1
16	Tenaga Pramubakti	Honorier	11
17	Tenaga Pengemudi	Honorier	1
Jumlah			69

Sumber : Bagian Kepegawaian Pusdik SDM Kesehatan (SIMKA)

Pada tabel di atas diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusdik SDM Kesehatan dilakukan oleh 69 orang pegawai Pusdik SDM Kesehatan terbagi dalam kelompok jabatan struktural, jabatan fungsional teknis, jabatan fungsional umum dan tenaga honorer, yang terdiri dari 57 orang pegawai negeri sipil dan 12 orang pegawai honorer.

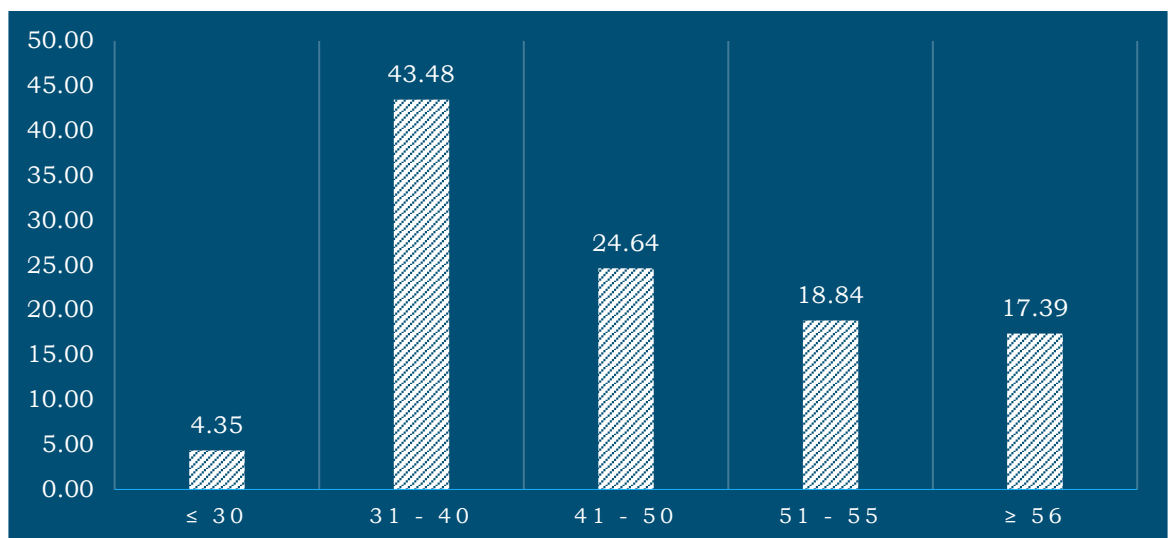
Sebagian besar pegawai Pusdik SDM Kesehatan ditempati oleh kelompok jabatan fungsional umum yaitu analisis kebijakan, pengadministrasian keuangan, dan arsiparis. Sejak tahun 2019 Pusdik SDM Kesehatan memiliki 4 orang analisis kebijakan ahli muda dan 6 orang analisis kebijakan ahli pertama, sehingga Pusdik SDM Kesehatan telah memiliki 10 orang pejabat fungsional teknis analisis kebijakan yang dapat membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Pusdik SDM Kesehatan.

Selain itu, terdapat 3 (tiga) orang staf yang sedang melanjutkan kuliah (tugas belajar) sehingga pelaksanaan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan dilakukan oleh 66 orang pegawai.

Tabel 3.7 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Umur
Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020

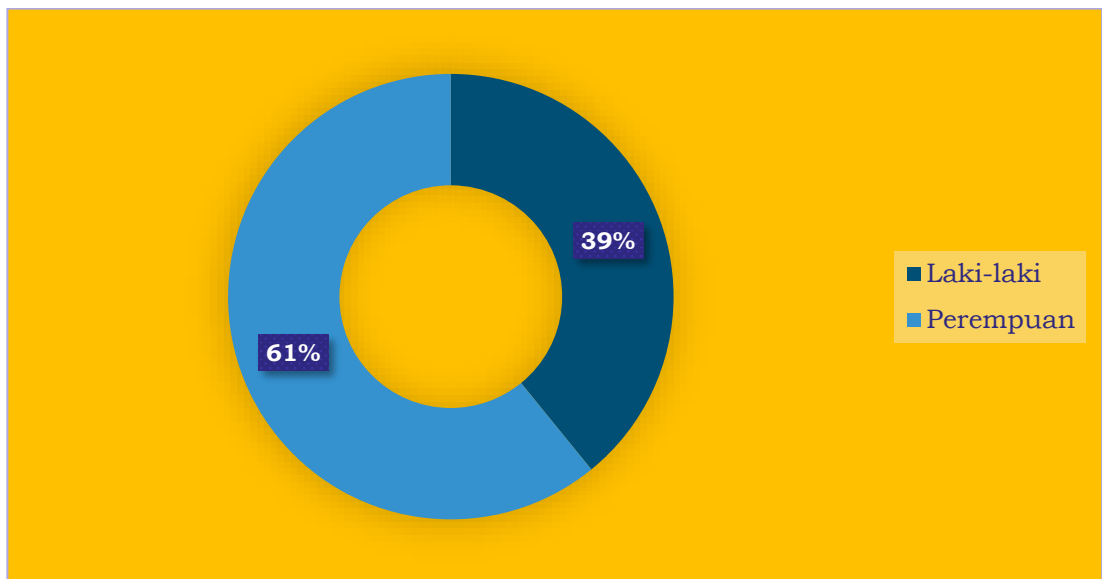
No.	Kelompok Umur	Jumlah
1.	≤ 30	3
2.	31-40	30
3.	41-50	17
4.	51-55	13
5.	≥ 56	6
Jumlah		69

Grafik 3.3 Persentase SDM Berdasarkan Kelompok Umur
Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020



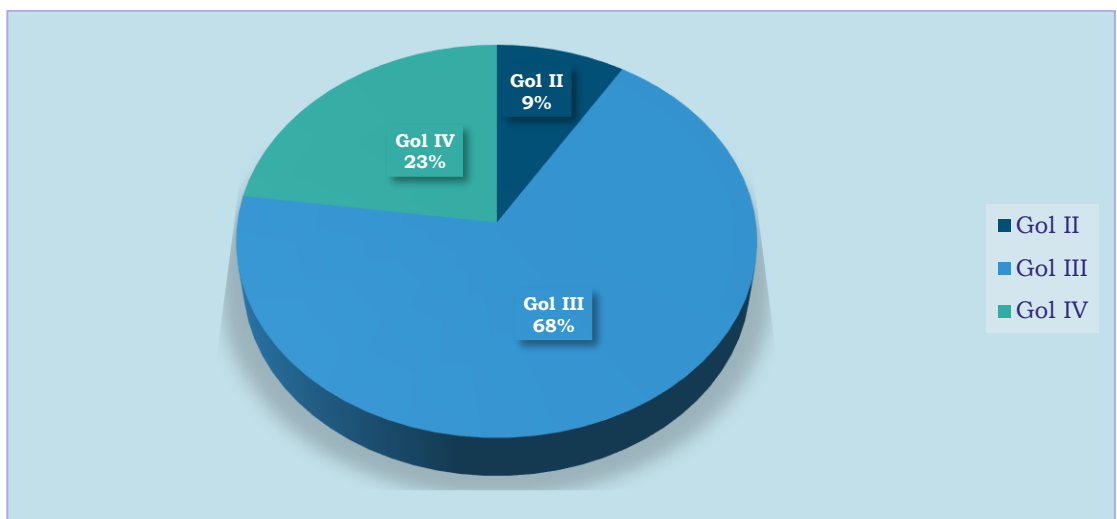
Berdasarkan tabel di atas kelompok umur pegawai Pusdik SDM Kesehatan sebagian besar berusia antara 31 – 40 tahun yaitu 43,48 % (30 orang) dari 69 orang pegawai. Sedangkan kelompok umur di atas 56 tahun atau mendekati usia pensiun sebanyak 17,39 % (6 orang) dari 69 orang.

Grafik 3.4 Persentase SDM Berdasarkan Jenis Kelamin
Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020



Berdasarkan tabel di atas SDM Pusdik SDM Kesehatan didominasi oleh pegawai berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 61 % (42 orang) dari 69 orang.

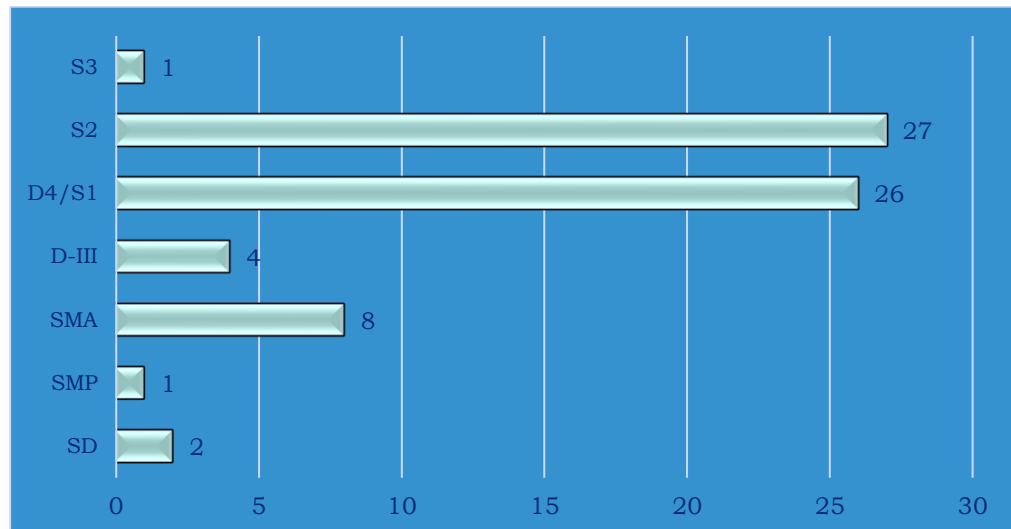
Grafik 3.5 Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan
Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020



Pada tabel dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pusdik SDM Kesehatan memiliki golongan III atau sebesar 68 % (39 orang) dari 57 orang pegawai. Golongan

kepegawaian tersebut ditentukan oleh masa kerja dan latar belakang pendidikan.

Grafik 3.6 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020



Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas tingkat pendidikan terakhir adalah D-IV/SI yaitu sebanyak 26 orang dan pendidikan S2 sebanyak 27 orang.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Pusdik SDM Kesehatan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan melalui tugas belajar dan ijin belajar. Adapun pendidikan yang diikuti diarahkan dan disesuaikan dengan tugas pokok pegawai tersebut untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan.

Selain itu, peningkatan kualitas SDM Pusdik SDM Kesehatan juga dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti

pelatihan/seminar/workshop yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.

2) Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan program dan kegiatan Pusdik SDM Kesehatan ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk urusan administrasi perkantoran, ketatausahaan dan untuk urusan Bidang Teknis Pendidikan SDM Kesehatan yang meliputi Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan, Bidang Pendidikan SDM Kesehatan dan Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu berada. Selain itu operasional perkantoran didukung juga dengan perangkat pengolah data seperti komputer, laptop, printer, LCD, scanner, dan fasilitas perkantoran seperti mesin penghancur kertas, dll. Secara lengkap daftar inventaris barang milik negara (BMN) Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 pada lampiran.

3) Pembiayaan

Alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan tahun 2020 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusdik SDM Kesehatan Nomor: SP DIPA-024.12.1.258490/2020 tanggal 12 November 2019 adalah sebesar Rp. 50.997.801.000 dengan anggaran yang terblokir pada catatan halaman IV DIPA sebesar Rp. 7.540.406.000. Dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2020 Pusdik SDM Kesehatan telah melakukan enam kali revisi DIPA dalam rangka antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektifitas dan kualitas belanja, diantaranya adalah revisi

efisiensi dan refocusing untuk penanggulangan Covid 19 sebesar Rp. 20.330.085.000, pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan, realokasi anggaran sebesar Rp. 11.437.518.000, dan adanya penambahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah langsung luar negeri (UNFPA) sebesar Rp. 1.000.573.000. Berdasarkan DIPA Pusdik SDM Kesehatan Nomor : SP-DIPA-24.12.1.258490/2020 tanggal 14 Desember 2020 alokasi anggaran Pusdik SDM Kesehatan menjadi Rp. 20.230.771.000. Rincian alokasi per jenis belanja yaitu belanja barang sebesar Rp. 18.993.771.000 dan belanja modal sebesar Rp. 1.237.000.000.

Selain anggaran pada DIPA Pusdik SDM Kesehatan terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan SDM kesehatan (2077) yang tersebar di 36 Poltekkes Kemenkes yaitu sebesar Rp. 13.161.301.000 untuk kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum D-III. Sehingga total alokasi anggaran untuk kegiatan pendidikan SDM kesehatan yaitu sebesar Rp. 33.392.072.000.

4) Analisa efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap kinerja Pusdik SDM Kesehatan

Pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan didukung oleh adanya SDM yang kompeten, disiplin dan berkualitas. Indikator dalam keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dari penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Nilai	Kategori
91- ke atas	Sangat Baik
76-90	Baik
61-75	Cukup
51-60	Kurang
50 ke bawah	Buruk

Berdasarkan data kepegawaian hasil penilaian prestasi kerja untuk seluruh pegawai Pusdik SDM Kesehatan untuk Tahun 2020 bernilai baik atau dalam rentang 76 – 90 yang berarti bahwa pegawai Pusdik SDM Kesehatan memiliki kinerja yang baik.

Keterkaitan kerja SDM Pusdik SDM Kesehatan tersebut terlihat juga pada pencapaian kinerja di masing-masing bidang yang menunjukkan adanya efisensi terhadap penggunaan anggaran yang ada pada DIPA Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Jumlah SDM dan Penggunaan Anggaran (DIPA Pusdik SDM Kesehatan) Terhadap Pencapaian Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020

No.	Bidang/ Sub Bidang	Perbandingan SDM terhadap capaian kinerja			Penggunaan Anggaran			Output Kinerja
		Σ SDM	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	%	
A	Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan dan Kemitraan	13 orang	23 dokumen	176,92	7.829.949.000	7.202.338.524	91,98	1) Pedoman Penyesuaian Progam Studi 2) Dokumen pengembangan CoE Poltekkes Kemenkes 3) Dokumen kajian kompetensi need assessment tenaga pendidik dan kependidikan

- 4) Dokumen kajian afirmasi bantuan biaya pendidikan dalam rangka penugasan khusus
- 5) 4 dokumen kebijakan afirmasi bantuan biaya pendidikan
- 6) Laporan evaluasi penyelenggaraan dan closing ceremony program percepatan pendidikan tenaga kesehatan
- 7) Laporan pelaksanaan bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan
- 8) Laporan workshop bidang pengembangan pendidikan dan kemitraan
- 9) Laporan kegiatan pemagangan dosen Poltekkes Kemenkes
- 10) Laporan kegiatan kerjasama detasering dosen Poltekkes Kemenkes
- 11) Laporan kegiatan Penyiapan Program Peningkatan Pengalaman Kerja dan Kualifikasi Internasional Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- 12) 6 dokumen kerjasama dengan lembaga terkait pendidikan SDM kesehatan
- 13) Dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama pendidikan bidang kesehatan
- 14) Laporan kegiatan pembinaan wilayah dalam rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan dan akses pelayanan kesehatan
- 15) Laporan kegiatan sosialisasi protokol kesehatan masyarakat dalam

									rangka peningkatan mutu tenaga kesehatan dan akses pelayanan kesehatan
B	Bidang Penyelenggaraan Pendidikan	17 orang	25 dokumen	147,06	4.482.038.000	4.474.007.410	99,82	1)	Kurikulum D-IV Audiologi
								2)	Kurikulum D-III Optometri
								3)	Kurikulum D-III Kardiovaskuler
								4)	Kurikulum D-III Sanitasi
								5)	Laporan kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di Poltekkes Kemenkes
								6)	Laporan kegiatan fasilitasi/workshop sertifikasi reviewer penelitian
								7)	Laporan kegiatan fasilitasi/bimbingan teknis penyelenggaraan rintisan kelas internasional keperawatan di 10 Poltekkes Kemenkes
								8)	Laporan kegiatan fasilitasi/bimbingan teknis penguatan implementasi interprofesional education di Poltekkes Kemenkes
								9)	Laporan kegiatan konsolidasi dan integrasi penguatan pelaksanaan tridharma PT
								10)	Pedoman pengajuan insentif Poltekkes Kemenkes
								11)	Laporan kegiatan pengembangan pembelajaran daring melalui sistem pembelajaran online Poltekkes Kemenkes (SPOKES) dan VILEP
								12)	9 Bahan ajar terstandar nasional
								13)	Laporan kegiatan pengembangan Sistem Informasi Akademik Poltekkes Kemenkes Terpadu (SIKAD)
								14)	Laporan kegiatan pembinaan

								pengabdian masyarakat berbasis riset di Poltekkes Kemenkes 15) Laporan kegiatan edu health fair 2020 16) Laporan kegiatan peningkatan kapasitas dosen dalam penguatan metodologi pembelajaran era 4.0 17) Laporan kegiatan workshop bidang penyelenggaraan pendidikan
C	Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan SDM Kesehatan	18 orang	28 dokumen	155,56	4.323.016.000	4.221.201.077	97,64	1) Laporan kegiatan fasilitasi pembinaan akreditasi prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes 2) Laporan kegiatan pemantapan akreditasi Poltekkes menuju akreditasi unggul 3) Laporan kegiatan klasterisasi Poltekkes Kemenkes 4) Laporan kegiatan sinkronisasi data prodi Poltekkes Kemenkes dengan PD Dikti 5) Laporan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes tingkat nasional 6) Pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi Poltekkes Kemenkes Tingkat Nasional 7) Laporan kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan tridharma perguruan tinggi 8) Juknis Sipenmaru Bersama Poltekkes Kemenkes 9) 8 standar laboratorium (D.III Kesehatan Lingkungan, Farmasi Dan Gizi, Keperawatan, Kebidanan, Jamu, Okupasi Terapi Dan Orthotik Prostetik) 10) Laporan kegiatan workshop

									implementasi SPMI Poltekkes Kemenkes 11) Laporan kegiatan pelaksanaan try out uji kompetensi pendidikan tenaga kesehatan 12) Laporan kegiatan persiapan pelaksanaan uji kompetensi program D-III dan D-IV pendidikan tenaga kesehatan 13) Laporan kegiatan workshop peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik untuk menjadi asesor 14) Laporan kegiatan pembinaan sertifikasi dosen dan beban kerja dosen 15) Laporan kegiatan penilaian dan pelaksanaan dosen berprestasi 16) Laporan penyusunan standar pengelolaan perpustakaan 17) Laporan kegiatan pengelolaan database ijazah pendidikan tenaga kesehatan 18) Laporan kegiatan penyusunan pedoman penerimaan mahasiswa baru GAKIN Poltekkes Kemenkes 19) Laporan kegiatan penyusunan pedoman wisuda Poltekkes Kemenkes 20) Laporan kegiatan workshop auditor mutu internal Poltekkes Kemenkes 21) Laporan kegiatan workshop penjaminan mutu dan akreditasi
D	Sub Bagian Tata Usaha	19 orang	42 dokumen	221,05	3.595.768.000	3.299.769.911	91,77	1)	7 dokumen rencana program dan penyusunan rencana anggaran (TOR dan RAB tahun 2021, RKA K/L tahun 2021, bahan masukan renstra, RAP, RAK

		Tahun 2020-2024, RPD tahun 2021, dokumen revisi DIPA/POK Tahun 2020, bahan masukan RKP tahun 2021)
	2)	3 dokumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja (LKj Tahun 2020, laporan tahunan 2020, laporan triwulan I-IV Tahun 2020)
	3)	6 dokumen pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMN (laporan keuangan smt I, II, dan triwulan I-IV, laporan BMN smt I, II dan triwulan I-IV
	4)	16 dokumen penatalaksanaan kepegawaian, kelembagaan dan tatalaksana organisasi (usulan : jabfung pegawai, kenaikan pangkat, pensiun, KGB, pencatuman gelar, cuti pegawai, KP4, BPJS pegawai, KARIS dan KARSU, pengajuan TASPEN, peta jabatan, SKP target 2020, monev SOP, laporan bezzetting, dokumen ABK)
	5)	Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas SDM Pusdik SDMK
	6)	4 dokumen penatalaksanaan pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan (rekap arsip aktif dan inaktif, berita acara pemindahan arsip, laporan penataan arsip, laporan penghapusan)
	7)	Laporan pelaksanaan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
	8)	Laporan pelaksanaan pengadaan

							peralatan dan fasilitas perkantoran
							9) Laporan kegiatan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Terkait Pendidikan dan Kesehatan
							10) Laporan kegiatan Koordinasi Rekrutmen Relawan Penanggulangan Covid-19
							11) Laporan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor
Jumlah	67 orang	118 dokumen	176,12	20.230.771.000	19.197.316.922	94,89	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan bila dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada (tidak termasuk tubel) tanpa memperhatikan karakteristik SDM (jabatan, latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin) mencapai 176,12 % atau lebih dari 100 %. Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran (penggunaan sumberdaya anggaran) cukup efisien karena dengan anggaran sebesar 94,89 % output dapat tercapai.

Selain itu dalam menunjang pencapaian output kegiatan, Pusdik SDM Kesehatan mengupayakan untuk menggunakan sarana prasarana yang tersedia secara maksimal baik untuk peralatan pengolahan data (komputer, laptop, printer, scanner, LCD, dll) maupun peralatan fasilitas perkantoran lainnya (mesin penghancur kertas). Apabila dalam pelaksanaan terdapat kendala dalam pemakaian dilakukan pemeliharaan mesin/peralatan secara berkala untuk memaksimalkan fungsi dari mesin/peralatan tersebut.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
2077	Pendidikan SDM Kesehatan	33.392.072.000	30.427.715.633	91,12

Sumber : Data SMART DJA per 12 Januari 2021

Berdasarkan tabel di atas, rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran berdasarkan DIPA Pusdik SDM Kesehatan sebesar Rp. 18.931.352.191 dari alokasi sebesar Rp. 20.230.771.000 (93,58 %) yang didalamnya termasuk juga kegiatan hibah langsung (UNFPA) untuk penguatan pendidikan kebidanan (implementasi center of excellence (CoE) kebidanan, rapat koordinasi institusi CoE, memastikan pengesahan standar pendidikan kebidanan).
2. Realisasi anggaran berdasarkan DIPA Poltekkes Kemenkes sebesar Rp. 11.496.363.442 dari alokasi sebesar Rp. 13.161.301.000 (87,35 %).

Bila alokasi dan realisasi anggaran dirinci berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dalam Rangka
Pencapaian Indikator Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator	Alokasi	Realisasi	%
Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	Jumlah Penerima Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	18.624.101.000	16.789.622.271	90,15

Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan	Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan (kumulatif)	14.767.971.000	13.638.093.362	92,35
Jumlah		33.392.072.000	30.427.715.633	91,12

Sumber : Data SMART DJA per 12 Januari 2021

Sedangkan realisasi anggaran per jenis belanja, dapat dirinci sebagai berikut pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendidikan SDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2020

Alokasi dan Realisasi Per Belanja	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Barang	32.155.072.000	29.256.054.833	90,98
Belanja Modal	1.237.000.000	1.171.660.800	94,72
Total Alokasi	33.392.072.000	30.427.715.633	91,12

Sumber : Data SMART DJA per 12 Januari 2021

1. Belanja Barang

Realisasi belanja barang sebesar Rp. 29.256.054.822 dari alokasi sebesar Rp. 32.155.072.000 (90,98 %) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Realisasi anggaran indikator jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK sebesar Rp. 16.789.622.271 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 18.624.101.000 (90,15 %) yang terdiri dari 1) Realisasi output kebijakan teknis afirmasi bantuan biaya pendidikan sebesar Rp. 43.746.906 dari

alokasi sebesar 157.700.000 (27,74 %), 2) Realisasi output jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima program bantuan biaya pendidikan sebesar Rp. 16.745.875.365 dari alokasi sebesar Rp. 18.466.401.000 (90,68 %).

- b. Realisasi anggaran indikator jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan yaitu sebesar Rp. 13.638.093.362 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 14.767.971.000 (92,35 %). Realisasi anggaran tersebut untuk mengakomodir output kegiatan prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya, prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan, pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya, layanan sarana dan prasarana internal, layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran.

Permasalahan dari segi realisasi anggaran yaitu anggaran sebesar Rp. 2.899.017.167 tidak terserap dengan rincian sebagai berikut : 1) sebesar Rp. 1.664.937.558 merupakan anggaran program percepatan RPL yang ada pada DIPA di 36 Poltekkes Kemenkes karena terdapat peserta yang mengundurkan diri dan adanya pandemi covid 19 pelaksanaan kegiatan (PBM) hanya dalam bentuk daring ataupun mandiri yang memang tidak menggunakan anggaran sebesar anggaran secara tatap muka sedangkan alokasi anggaran dibeberapa Poltekkes Kemenkes masih teralokasi dalam bentuk pertemuan, 2) alokasi sebesar Rp. 1.234.079.609 pada DIPA Pusdik SDMK tidak terserap karena adanya pengembalian belanja perjalanan dinas seperti transport, uang harian dan penginapan yang realisasi anggarannya di bawah SBM, adanya tahapan kegiatan yang tidak direalisasikan

secara maksimal (honor nara sumber yang dibiayai oleh satker lain), adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehingga dibatalkan oleh instansi terkait (kegiatan pemagangan dosen).

Tindak lanjut yang dilakukan adalah 1) melakukan bedah DIPA Tahun 2021 untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi yang ada, 2) melakukan revisi kegiatan dan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan, 3) menyesuaikan kembali RPK/RPD dan segera melaksanakan kegiatan, 4) tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat progres realisasi anggaran dan pencapaian target indikator.

2. Belanja Modal

Realisasi anggaran belanja modal yaitu sebesar Rp. 1.171.660.800 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.237.000.000 (94,72 %). Realisasi anggaran tersebut untuk pengadaan pengembangan aplikasi sipenmaru bersama Poltekkes Kemenkes dan sistem informasi penelitian & publikasi Poltekkes Kemenkes, perangkat pengolah data dan komunikasi serta perangkat fasilitas perkantoran dalam rangka mendukung kegiatan era new normal. Dari segi realisasi anggaran tidak dapat diserap dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan penawaran dari penyedia lebih rendah dari HPS/alokasi anggaran yang tersedia.

C. Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan di Tahun 2020 diukur berdasarkan capaian indikator yang telah ditetapkan melalui pengukuran output kegiatan RKA K/L Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2020 dalam rangka mendukung capaian target indikator

pada Renstra Kemenkes, Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan. Untuk itu, target/capaian dan alokasi/realisasi anggaran pada output kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13 Alokasi dan Realisasi Anggaran Disandingkan Dengan Output Kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020

Fungsi/Output	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	%
Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya	20 Prodi dan Institusi	62 prodi	310	7.990.636.000	7.694.401.852	96,29
Tenaga Kesehatan Yang Belum Diploma III Yang Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Pada Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kes	1.391 Orang	1.391 Orang	100	5.313.050.000	5.249.511.923	98,95
Tenaga Kesehatan Yang Belum Diploma III Yang Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Pada Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kes (di Poltekkes Kemenkes)	4.833 Orang	4.734 Orang	97,95	13.161.301.000	11.496.363.442	87,35
Kebijakan Teknis Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Rangka Penugasan Khusus Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK (Output Prioritas Nasional)	4 Kebijakan Teknis	4 Kebijakan Teknis	100	157.700.000	43.746.906	27,74
Prodi Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program	24 Prodi	27 Prodi	112,50	2.171.328.000	1.791.429.195	82,50

Pembangunan Kesehatan (Output Prioritas Nasional)						
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	1.570 Orang	1.983 Orang	126,31	1.010.239.000	853.443.623	84,63
Layanan dan Sarana Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100 %	800.900.000	720.965.800	90,02
Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100 %	1.123.656.000	1.061.008.233	94,42
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %	1.671.212.000	1.516.844.709	90,76
Pendidikan SDM Kesehatan (2077)				33.392.072.000	30.427.715.633	91,12

BAB IV

PENUTUP

LKj Pusdik SDM Kesehatan tahun 2020 merupakan laporan ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap dan jelas atas pencapaian kinerja atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja dalam penetapan kinerja Pusdik SDM Kesehatan. Selain itu laporan kinerja ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program terhadap pencapaian kinerja yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2020 - 2024.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian indikator jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah dan DTPK yaitu 0 dari target 0. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 ini masih dilakukan penyiapan regulasi/kebijakan untuk pelaksanaan program tersebut. Saat ini dokumen draft regulasi/kebijakan masih dalam proses pengesahan oleh Menteri Kesehatan. Untuk penerimaan/rekrutmen peserta afirmasi akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan target sebanyak 500 orang. Sedangkan untuk program bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum D-III T.A 2019/2020 (Program percepatan pendidikan tenaga kesehatan/RPL) telah berakhir pada tahun 2020, namun dalam mengakomodir proses pelaksanaan kegiatan PBM tersebut tetap di anggarakan dalam DIPA Pusdik SDM Kesehatan dan DIPA di 36 Poltekkes Kemenkes. Capaian indikator program bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum D-III T.A 2019/2020 sebanyak 6.125 orang dari target sebanyak 6.224 orang (98,41 %).

2. Capaian indikator jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan yaitu sebanyak 89 prodi dan Lembaga (171,15%) dari target 52 prodi dan lembaga dengan rincian sebagai berikut: 1) penyesuaian secara kuantitas berupa penambahan jumlah prodi baru yaitu sebanyak 7 prodi Poltekkes Kemenkes, 2) penyesuaian secara kualitas berupa prodi dan lembaga yang meningkat status akreditasinya sebanyak 62 prodi (hasil akreditasi prodi/institusi yang dihitung dalam capaian kinerja adalah yang meningkat dari C ke B, B ke A), pengembangan pusat unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK)/ *Center of Excellence* (CoE) di 5 Prodi Poltekkes Kemenkes, pengembangan prodi ners rintisan kelas internasional (RKI) di 9 Poltekkes Kemenkes, serta perluasan 6 kerjasama dengan mitra di dalam negeri. Tercapainya target indikator jumlah prodi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan karena adanya peningkatan jumlah prodi yang meningkat status akreditasinya.
3. Realisasi anggaran kegiatan Pendidikan SDM Kesehatan (2077) Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 30.427.715.633 (91,12%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 33.392.072.000 terdiri dari :
 - a. Realisasi anggaran yang ada pada DIPA Pusdik SDM Kesehatan yaitu sebesar Rp. 18.931.352.191 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 20.230.771.000 (93,58 %).
 - b. Realisasi anggaran berdasarkan DIPA Poltekkes Kemenkes sebesar Rp. 11.496.363.442 dari alokasi sebesar Rp. 13.161.301.000 (87,35 %).
4. Setiap capaian indikator Pusdik SDM Kesehatan telah dilakukan monitoring dan evaluasi per triwulan sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun berjalan serta perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

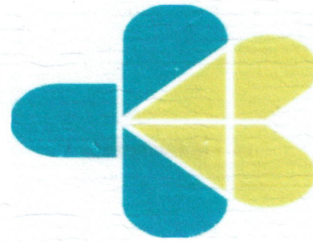
Berdasarkan kesimpulan di atas, perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis agar capaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan ke depannya dapat meningkat, yaitu :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Hukormas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Biro Hukor Kemenkes untuk proses pengesahan 4 dokumen kebijakan teknis (Permenkes program afirmasi dan 3 Juknis program afirmasi).
2. Segera melakukan sosialisasi dan rekrutmen peserta program afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK serta berkoordinasi dengan Poltekkes Kemenkes penyelenggara dan Dinas Kesehatan terkait (mengacu pada Permenkes dan Juknis Afirmasi yang sudah disahkan).
3. Mematangkan pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes menjadi Institut Kesehatan Nasional (IKN) agar dapat mendirikan prodi-prodi yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dengan berdasarkan pada kajian dan peta pengembangan pendidikan tenaga kesehatan, c) menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka Peningkatan Peran PTS dan PTK untuk Produksi Prodi Langka dan Pembatasan Prodi Jenuh, serta Penambahan/Pembatasan Kuota Mahasiswa Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, d) menyusun rekomendasi kebijakan (kajian) terkait Kebijakan Program Percepatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis, e) melakukan pembinaan prodi dan institusi Poltekkes Kemenkes dalam hal peningkatan status akreditasi, pengembangan pusat unggulan IPTEKS Poltekkes Kemenkes, pengembangan rintisan kelas internasional untuk prodi lainnya di Poltekkes Kemenkes dan perluasan kerjasama dengan mitra tidak hanya di dalam tetapi juga di luar negeri agar kualitas lulusan tenaga kesehatan yang dihasilkan dapat berkontribusi dalam pembangunan kesehatan.

4. Menyusun strategi percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta tetap melaksanakan kegiatan selama masa *pandemi* CoVid 19 dengan memilih kegiatan yang dapat dilaksanakan secara daring, luring ataupun mandiri agar output kegiatan tetap dapat tercapai.
5. Selain itu Sub Bidang/Bagian di lingkungan Pusdik SDM Kesehatan agar melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran lebih efektif dan efisien.
 - b. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran secara efisien dan efektif dalam mendukung program pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai.
 - c. Meningkatkan peran sistem dan manajemen organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan baik dan lancar melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala.

LAMPIRAN

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
Selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini serta akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama dan Kedua akan membahas ulang perjanjian ini bila terjadi perubahan kebijakan dan revisi anggaran.

Pihak Kedua,

dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP. 196405201991031003

Jakarta, 13, November 2020
Pihak Pertama,

Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
NIP. 196607221989031002

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Tahun : 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	0
Penyesuaian Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan* (kumulatif)	52 Prodi dan Lembaga

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 32.391.499.000

(Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Pihak Kedua,

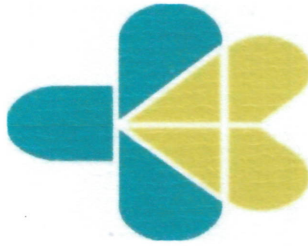

dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS
NIP. 196405201991031003

Jakarta, 13 November 2020

Pihak Pertama,


Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
NIP. 196607221989031002

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugiyanto, S.Pd, M.App,Sc
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Kirana Pritasari, MQIH
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 November 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Kirana Pritasari, MQIH

NIP. 196404081990032001

Sugiyanto, S.Pd, M.App,Sc

NIP. 196607221989031002

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Tahun Anggaran : 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah Penerima Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	0
Penyesuaian Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan	52 prodi dan institusi

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 65.949.801.000

(Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah)

Jakarta, 28 November 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



dr. Kirana Pritasari, M.Q.I.H

NIP. 196404081990032001



Sugiyanto, S.Pd, M.App. Sc

NIP. 196607221989031002

REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2020

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : 10 - Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar
4. KEGIATAN : 2077 - Pendidikan SDM Kesehatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2020	ALOKASI 2020 (RIBU)
03	Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK		18.624.101,0
03.01	Jumlah Penerima Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	0	
04	Penyesuaian Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan		14.767.971,0
04.01	Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan	52	
Total			33.392.072,0

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
0												0,0
0.001	Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Terakreditasi Minimal Sangat Baik								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	0,0
0.004	Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Bidang Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	0,0
0.004.001	Tanpa Sub Output											0,0
03	Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK											18.624.101,0
03.006	Tenaga Kesehatan Yang Belum Diploma III Yang Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Pada Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	18.466.401,0
03.006.001	Tanpa Sub Output											18.466.401,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
	051 - Persiapan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan											34.975,0
		Pusat	Pusat									0,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang									1.271,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang									32.021,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang									1.683,0
	052 - Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan											17.573.510,0
		Pusat	Pusat									4.545.000,0
		Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh									1.467.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan									984.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang									21.950,0
		Provinsi Riau	Kota Pekanbaru									225.000,0
		Provinsi Jambi	Kota Jambi									387.000,0
		Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang									444.000,0
		Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu									39.000,0
		Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung									472.000,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang									46.800,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang									24.010,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi DKI Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan									582.025,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									322.090,0
		Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya									228.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta									38.000,0
		Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang									609.000,0
		Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta									108.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Malang									271.736,0
		Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya									286.683,0
		Provinsi Banten	Kota Serang									148.010,0
		Provinsi Bali	Kota Denpasar									51.000,0
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram									116.327,0
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang									339.000,0
		Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak									156.000,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya									0,0
		Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin									600.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda									24.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado									272.036,0
		Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu									342.540,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar									479.038,0
		Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari									342.419,0
		Provinsi Maluku	Kota Ambon									2.016.000,0
		Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate									307.846,0
		Provinsi Papua Barat	Kota Sorong									318.000,0
		Provinsi Papua	Kota Jayapura									960.000,0
	053 - Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan											857.916,0
		Pusat	Pusat									760.100,0
		Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang									16.749,0
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang									46.760,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang									1.307,0
		Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya									33.000,0
03.007	Kebijakan Teknis Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Rangka Penugasan Khusus Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan Dan DTPK				Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	006 - Anggaran Kesehatan		ya	157.700,0
03.007.001	Tanpa Sub Output											157.700,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
	051 - Penyusunan Kajian Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Rangka Penugasan Khusus Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK											59.580,0
		Pusat	Pusat									59.580,0
	052 - Penyusunan Kebijakan Teknis Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Rangka Penugasan Khusus Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK											98.120,0
		Pusat	Pusat									98.120,0
04	<i>Penyesuaian Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan</i>											14.767.971,0
04.003	Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	0,0
04.005	Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Status Akreditasinya								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	7.990.636,0
04.005.001	Tanpa Sub Output											7.990.636,0
	051 - Penguatan Implementasi SPMI Poltekkes Kemenkes											3.246.841,0
		Pusat	Pusat									3.246.841,0
	052 - Penguatan Implementasi SPME Poltekkes Kemenkes											585.553,0
		Pusat	Pusat									585.553,0
	053 - Penguatan Kualitas Pembelajaran											1.911.886,0
		Pusat	Pusat									1.911.886,0
	054 - Penguatan Kualitas Penelitian											621.371,0
		Pusat	Pusat									621.371,0
	055 - Penguatan Kualitas Pengabdian Masyarakat											338.432,0
		Pusat	Pusat									338.432,0
	056 - Penguatan Program Kemahasiswaan											1.257.323,0
		Pusat	Pusat									1.257.323,0
	057 - Evaluasi Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes											29.230,0
		Pusat	Pusat									29.230,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
04.008	Prodi Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan				Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	006 - Anggaran Kesehatan		tidak	2.171.328,0
04.008.001	Tanpa Sub Output											2.171.328,0
	051 - Penyesuaian Prodi Pendidikan SDM Kesehatan											189.184,0
		Pusat	Pusat									189.184,0
	052 - Pengembangan Program Pendidikan SDM Kesehatan											269.282,0
		Pusat	Pusat									269.282,0
	053 - Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Bidang Kesehatan											1.712.862,0
		Pusat	Pusat									1.712.862,0
04.009	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	1.010.239,0
04.009.001	Tanpa Sub Output											1.010.239,0
	051 - Competency Need Aessment Pendidik dan Tenaga Kependidikan											133.277,0
		Pusat	Pusat									133.277,0
	052 - Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Pelatihan, Workshop, Seminar, Pemagangan											876.962,0
		Pusat	Pusat									876.962,0
04.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	800.900,0
04.951.001	Tanpa Sub Output											800.900,0
	056 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi											771.900,0
		Pusat	Pusat									771.900,0
	057 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran											29.000,0
		Pusat	Pusat									29.000,0
04.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	1.123.656,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
04.970.001	Tanpa Sub Output											1.123.656,0
	051 - Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran											96.443,0
		Pusat	Pusat									96.443,0
	052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi											20.891,0
		Pusat	Pusat									20.891,0
	053 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan											47.260,0
		Pusat	Pusat									47.260,0
	054 - Pengelolaan kepegawaian											368.680,0
		Pusat	Pusat									368.680,0
	055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan											590.382,0
		Pusat	Pusat									590.382,0
04.994	Layanan Perkantoran								006 - Anggaran Kesehatan		tidak	1.671.212,0
04.994.001	Tanpa Sub.Output											1.671.212,0
	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor											1.671.212,0
		Pusat	Pusat									1.671.212,0
Total												33.392.072,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU)

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU)											
KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2020			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2020 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023
0					0,0				0,0	0,0	0,0
0.001	Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Terakreditasi Minimal Sangat Baik	0	Prodi dan Institusi		0,0				0,0	0,0	0,0
0.004	Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Bidang Kesehatan	0	Dokumen		0,0				0,0	0,0	0,0
0.004.001	Tanpa Sub Output				0,0				0,0	0,0	0,0
03	Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK				18.624.101,0				0,0	0,0	0,0
03.006	Tenaga Kesehatan Yang Belum Diploma III Yang Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Pada Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan	6224	Orang		18.466.401,0				0,0	0,0	0,0
03.006.001	Tanpa Sub Output				18.466.401,0				0,0	0,0	0,0
03.006.001.051	Persiapan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan	1,0	Dokumen	34.975,0	34.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2020			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2020 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023
03.006.001.052	Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan	6.224,0	Orang	2.823,5	17.573.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.006.001.053	Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan	1,0	Dokumen	857.916,0	857.916,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.007	Kebijakan Teknis Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Rangka Penugasan Khusus Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan Dan DTPK	4	Kebijakan Teknis		157.700,0				0,0	0,0	0,0
03.007.001	Tanpa Sub Output				157.700,0				0,0	0,0	0,0
03.007.001.051	Penyusunan Kajian Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Rangka Penugasan Khusus Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	1,0	Dokumen	59.580,0	59.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.007.001.052	Penyusunan Kebijakan Teknis Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Rangka Penugasan Khusus Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	4,0	Kebijakan Teknis	24.530,0	98.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Penyesuaian Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan				14.767.971,0				62.874.496,0	71.420.295,0	75.631.853,0
04.003	Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan	0	Prodi / Institusi		0,0				0,0	0,0	0,0
04.005	Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Status Akreditasinya	20	Prodi dan Institusi		7.990.636,0				27.706.974,0	29.742.490,0	31.927.678,0
04.005.001	Tanpa Sub Output				7.990.636,0				27.706.974,0	29.742.490,0	31.927.678,0
04.005.001.051	Penguatan Implementasi SPMI Poltekkes Kemenkes	38,0	Institusi	85.443,2	3.246.841,0	38,0	38,0	38,0	8.503.890,0	9.099.174,0	9.736.114,0
04.005.001.052	Penguatan Implementasi SPME Poltekkes Kemenkes	20,0	Prodi dan Institusi	29.277,7	585.553,0	28,0	28,0	28,0	5.364.521,0	5.766.860,0	6.199.375,0
04.005.001.053	Penguatan Kualitas Pembelajaran	38,0	Institusi	50.312,8	1.911.886,0	38,0	38,0	38,0	6.599.095,0	7.094.027,0	7.626.079,0
04.005.001.054	Penguatan Kualitas Penelitian	38,0	Institusi	16.351,9	621.371,0	38,0	38,0	38,0	2.740.804,0	2.946.365,0	3.167.342,0
04.005.001.055	Penguatan Kualitas Pengabdian Masyarakat	10,0	Pengabmas Kompetitif Nasional	33.843,2	338.432,0	10,0	10,0	10,0	629.460,0	676.670,0	727.420,0
04.005.001.056	Penguatan Program Kemahasiswaan	38,0	Institusi	33.087,4	1.257.323,0	38,0	38,0	38,0	2.567.239,0	2.759.782,0	2.966.765,0
04.005.001.057	Evaluasi Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes	1,0	Laporan	29.230,0	29.230,0	2,0	2,0	2,0	1.301.965,0	1.399.612,0	1.504.583,0
04.008	Prodi Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan	24	Prodi		2.171.328,0				16.255.715,0	17.474.893,0	18.785.510,0
04.008.001	Tanpa Sub Output				2.171.328,0				16.255.715,0	17.474.893,0	18.785.510,0
04.008.001.051	Penyesuaian Prodi Pendidikan SDM Kesehatan	14,0	Prodi	13.513,1	189.184,0	12,0	12,0	12,0	5.918.789,0	6.362.698,0	6.839.900,0
04.008.001.052	Pengembangan Program Pendidikan SDM Kesehatan	5,0	Prodi dan Institusi	53.856,4	269.282,0	2,0	2,0	2,0	2.865.762,0	3.080.694,0	3.311.746,0
04.008.001.053	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Bidang Kesehatan	5,0	Prodi dan Institusi	342.572,4	1.712.862,0	10,0	10,0	10,0	7.471.164,0	8.031.501,0	8.633.864,0
04.009	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	1570	Orang		1.010.239,0				14.356.354,0	19.316.733,0	19.316.733,0
04.009.001	Tanpa Sub Output				1.010.239,0				14.356.354,0	19.316.733,0	19.316.733,0
04.009.001.051	Competency Need Assesment Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,0	Dokumen	133.277,0	133.277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.009.001.052	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Pelatihan, Workshop, Seminar, Pemagangan	1.570,0	Orang	558,6	876.962,0	1.380,0	1.210,0	1.200,0	14.356.354,0	19.316.733,0	19.316.733,0
04.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan		800.900,0				413.300,0	439.070,0	469.805,0
04.951.001	Tanpa Sub Output				800.900,0				413.300,0	439.070,0	469.805,0
04.951.001.050	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	139,0	Unit	5.553,2	771.900,0	46,0	23,0	23,0	383.800,0	417.030,0	446.222,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2020			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2020 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2021	2022	2023	2021	2022	2023
04.951.001.057	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	9,0	Unit	3.222,2	29.000,0	10,0	1,0	1,0	29.500,0	22.040,0	23.583,0
04.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan		1.123.656,0				2.005.946,0	2.078.446,0	2.597.636,0
04.970.001	Tanpa Sub Output				1.123.656,0				2.005.946,0	2.078.446,0	2.597.636,0
04.970.001.051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	2,0	Dokumen	48.221,5	96.443,0	1,0	1,0	1,0	337.500,0	337.500,0	441.887,0
04.970.001.052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	2,0	Dokumen	10.445,5	20.891,0	2,0	2,0	2,0	127.110,0	199.610,0	199.610,0
04.970.001.053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1,0	Dokumen	47.260,0	47.260,0	1,0	1,0	1,0	133.900,0	133.900,0	133.900,0
04.970.001.054	Pengelolaan kepegawaian	68,0	Orang	5.421,8	368.680,0	72,0	72,0	72,0	328.000,0	328.000,0	328.000,0
04.970.001.055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	2,0	Dokumen	295.191,0	590.382,0	1,0	1,0	1,0	1.079.436,0	1.079.436,0	1.494.239,0
04.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		1.671.212,0				2.136.207,0	2.368.663,0	2.534.491,0
04.994.001	Tanpa Sub.Output				1.671.212,0				2.136.207,0	2.368.663,0	2.534.491,0
04.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,0	Layanan	1.671.212,0	1.671.212,0	1,0	1,0	1,0	2.136.207,0	2.368.663,0	2.534.491,0
Total					33.392.072,0	-	-	-	62.874.496,0	71.420.295,0	75.631.853,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.001	Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Terakreditasi Minimal Sangat Baik		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.004	Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Bidang Kesehatan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.004.001	Tanpa Sub Output		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK		18.624.101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.624.101,0
03.006	Tenaga Kesehatan Yang Belum Diploma III Yang Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan Pada Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan		18.466.401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.466.401,0
03.006.001	Tanpa Sub Output		18.466.401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.466.401,0
03.006.001.051	Persiapan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan	Pendukung	34.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34.975,0
03.006.001.052	Pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan	Utama	17.573.510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.573.510,0
03.006.001.053	Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan	Pendukung	857.916,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	857.916,0
03.007	Kebijakan Teknis Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Rangka Penugasan Khusus Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan Dan DTPK		157.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157.700,0
03.007.001	Tanpa Sub Output		157.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157.700,0
03.007.001.051	Penyusunan Kajian Afirmasi Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Rangka Penugasan Khusus Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Pendukung	59.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59.580,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
03.007.001.052	Penyusunan Kebijakan Teknis Afiriasi Bantuan Biaya Pendidikan Dalam Rangka Penugasan Khusus Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Utama	98.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98.120,0
04	Penyesuaian Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan		14.767.971,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.767.971,0
04.003	Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04.005	Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Meningkatkan Status Akreditasinya		7.990.636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.990.636,0
04.005.001	Tanpa Sub Output		7.990.636,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.990.636,0
04.005.001.051	Penguatan Implementasi SPMI Poltekkes Kemenkes	Utama	3.246.841,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.246.841,0
04.005.001.052	Penguatan Implementasi SPME Poltekkes Kemenkes	Utama	585.553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585.553,0
04.005.001.053	Penguatan Kualitas Pembelajaran	Utama	1.911.886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.911.886,0
04.005.001.054	Penguatan Kualitas Penelitian	Utama	621.371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621.371,0
04.005.001.055	Penguatan Kualitas Pengabdian Masyarakat	Utama	338.432,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338.432,0
04.005.001.056	Penguatan Program Kemahasiswaan	Pendukung	1.257.323,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.257.323,0
04.005.001.057	Evaluasi Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes	Pendukung	29.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.230,0
04.008	Prodi Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan		2.171.328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.171.328,0
04.008.001	Tanpa Sub Output		2.171.328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.171.328,0
04.008.001.051	Penyesuaian Prodi Pendidikan SDM Kesehatan	Utama	189.184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	189.184,0
04.008.001.052	Pengembangan Program Pendidikan SDM Kesehatan	Utama	269.282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269.282,0
04.008.001.053	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pendidikan Bidang Kesehatan	Utama	1.712.862,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.712.862,0
04.009	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Ditingkatkan Kompetensinya		1.010.239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.010.239,0
04.009.001	Tanpa Sub Output		1.010.239,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.010.239,0
04.009.001.051	Competency Need Assessment Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendukung	133.277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133.277,0
04.009.001.052	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Pelatihan, Workshop, Seminar, Pemagangan	Utama	876.962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	876.962,0
04.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		800.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.900,0
04.951.001	Tanpa Sub Output		800.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.900,0
04.951.001.056	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pendukung	771.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	771.900,0
04.951.001.057	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pendukung	29.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.000,0
04.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker		1.123.656,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.123.656,0
04.970.001	Tanpa Sub Output		1.123.656,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.123.656,0
04.970.001.051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	Pendukung	96.443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96.443,0
04.970.001.052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Pendukung	20.891,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.891,0
04.970.001.053	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Pendukung	47.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47.260,0
04.970.001.054	Pengelolaan kepegawaian	Pendukung	368.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368.680,0
04.970.001.055	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	Pendukung	590.382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590.382,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
04.994	Layanan Perkantoran		1.671.212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.671.212,0
04.994.001	Tanpa Sub.Output		1.671.212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.671.212,0
04.994.001.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pendukung	1.671.212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.671.212,0
Total			33.392.072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.392.072,0

Jakarta, 31 Desember 2020

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan



Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.SC
NIP. 196607221989031002

CAPAIAN INDIKATOR PUSDIK SDM KESEHATAN TAHUN 2020

No	SASARAN	INDIKATOR	RENSTRA			RENJA			R K P			RKA K/L			Keterangan
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	%	
1.	Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	Jumlah Penerima Afimasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK	0	-	100	0	-	100	0	-	100	18.624.101.000	16.789.622.271	90.15	- Target indikator Jumlah Penerima Afimasi Bantuan Biaya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan dan DTPK di Tahun 2020 adalah 0
2.	Penyesuaian Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan	Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan (kumulatif)	52 prodi dan lembaga	89 prodi dan lembaga	171.15	52 prodi dan lembaga	89 prodi dan lembaga	171.15	52 prodi dan lembaga	89 prodi dan lembaga	171.15	14.767.971.000	13.638.093.362	92.35	- Sampai dengan bulan Desember 2020 terdapat capaian pada indikator ini sebanyak 89 prodi dan lembaga yang disesuaikan yaitu : 1) penyesuaian secara kuantitas berupa penambahan jumlah prodi baru yaitu sebanyak 7 prodi Poltekkes Kemenkes, 2) penyesuaian secara kualitas berupa prodi dan institusi yang meningkat status akreditasinya sebanyak 62 prodi (hasil akreditasi prodi/institusi yang dihitung dalam capaian kinerja adalah yang meningkat dari C ke B, B ke A), pengembangan pusat unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) di 5 prodi Poltekkes Kemenkes dan pengembangan prodi ners rintisan kelas internasional (RKI) di 9 Poltekkes Kemenkes serta perluasan 6 kerjasama dengan mitra di dalam negeri.
JUMLAH												33.392.072.000	30.427.715.633	91.12	

Jakarta, Januari 2021
Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc
NIP. 196607221989031002

**MATRIK TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN
KESEHATAN TAHUN 2020**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
A.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyesuaian prodi	1	dokumen
		Jumlah dokumen kebijakan afirmasi bantuan biaya pendidikan dalam rangka penugasan khusus diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK	4	kebijakan teknis
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	17	prodi
		Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan	1	dokumen
		Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima bantuan biaya pendidikan : • Di Pusdik SDMK : 1.391 orang • Di Poltekkes Kemenkes (relokasi) : 4.833 orang	6.224	orang
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	10	Orang
		Jumlah dokumen Pembinaan Wilayah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Akses Pelayanan Mutu Kesehatan	1	Dokumen
		Monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan	2	Dokumen
B.	Kebijakan teknis pendidikan dan pembinaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber	Jumlah dokumen kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan	6	Dokumen
		Jumlah prodi dan institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas pembelajaran	38	Institusi
		Jumlah prodi pendidikan SDM kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program	9	Prodi

	daya manusia kesehatan	Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan kualitas penelitian	38	Institusi
		Jumlah dokumen penguatan kualitas pengabdian masyarakat	10	pengabmas unggulan
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan program kemahasiswaan	38	Institusi
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	60	Orang
C.	Kebijakan teknis dan pembinaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan	Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi akreditasi pendidikan SDM kesehatan	1	Dokumen
		Jumlah program studi dan institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya	20	prodi dan institusi
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan akreditasi Poltekkes Kemenkes	1	Dokumen
		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	1.450	Orang
		Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM kesehatan	9	Dokumen
		Jumlah institusi yang difasilitasi dalam penguatan implementasi SPMI	38	Institusi
D.	Terlaksananya ketatausahaan pendidikan SDM kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	9	Unit
		Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	139	Unit
		Jumlah dokumen rencana program dan penyusunan rencana anggaran	2	Dokumen
		Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	2	Dokumen
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	1	Dokumen
		Jumlah pengelolaan kepegawaian	68	Orang
		Jumlah layanan umum, layanan rumah tangga dan perlengkapan	1	Layanan
		Jumlah realisasi anggaran operasional dan pemeliharaan kantor	90	Persen



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan oleh Perkumpulan Institusi Promotor Kesehatan Nusantara (PIPKN) kepada :

**Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia**

Atas kerjasama dalam:

**“Penyusunan Soal Uji Kompetensi Program DIII dan DIV
Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2020”**

Jakarta, 29 Desember 2020

Ketua PIPKN



Dian Ayubi
Dr. Dian Ayubi, S.KM, M.QIH
NIDN 0025087204



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada

PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

Atas dukungan, kerja sama, dan fasilitasi pada kegiatan
Penyusunan Soal Uji Kompetensi Program D.III dan DIV
Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2020

Jakarta, 28 Desember 2020

Ketua Umum PPPKMI

Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

DIGITAL DEVELOPMENT AWARDS 2020

DEVELOPMENT IN A DIGITAL AGE

#DigiAwards



PHOTO: HRH2030

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

Tanggal : 15-03-2021
Halaman : 1
Kode Lap. : LBSGKT

NAMA UAKPB : 024.12.00.258490 PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
						BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
132111	PERALATAN DAN MESIN		1,724	3,673,284,530	102	712,375,800	77	676,167,200	1,749	3,709,493,130	
3.01.03	ALAT BANTU	Unit	2	12,000	0	0	0	0	2	12,000	
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Buah	2	3,000,000	0	0	0	0	2	3,000,000	
3.05.01	ALAT KANTOR		411	580,532,800	0	0	6	23,250,000	405	557,282,800	
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	915	341,047,500	13	48,820,000	8	98,250,000	920	291,617,500	
3.06.01	ALAT STUDIO		87	193,439,600	19	21,340,000	10	45,600,000	96	169,179,600	
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	4	6,374,000	0	0	0	0	4	6,374,000	
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Buah	5	25,750,000	0	0	3	9,750,000	2	16,000,000	
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Buah	4	880,000	0	0	0	0	4	880,000	
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Buah	4	1,217,500	0	0	0	0	4	1,217,500	
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	159	2,065,912,500	24	423,641,800	28	450,151,500	155	2,039,402,800	
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER		130	454,837,380	46	218,574,000	22	49,165,700	154	624,245,680	
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Buah	1	281,250	0	0	0	0	1	281,250	
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		6	949,371,000	0	0	0	0	6	949,371,000	
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	6	949,371,000	0	0	0	0	6	949,371,000	
135121	ASET TETAP LAINNYA		714	416,275,005	0	0	0	0	714	416,275,005	
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	Buah	714	416,275,005	0	0	0	0	714	416,275,005	
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		144	527,342,400	36	352,730,200	0	0	180	880,072,600	
3.01.03	ALAT BANTU	Unit	1	42,000	0	0	0	0	1	42,000	
3.05.01	ALAT KANTOR	Buah	31	3,423,000	0	0	0	0	31	3,423,000	
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	60	23,628,000	0	0	0	0	60	23,628,000	
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	8	102,300,000	0	0	0	0	8	102,300,000	
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Buah	1	10,450,000	0	0	0	0	1	10,450,000	
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	33	364,006,000	20	328,647,500	0	0	53	692,653,500	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA UAKPB : 024.12.00.258490 PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN

Tanggal : 15-03-2021

Halaman : 2

Kode Lap. : LBSGKT

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	10	23,493,400	16	24,082,700	0	0	26	47,576,100
TOTAL				5,566,272,935		1,065,106,000		676,167,200		5,955,211,735

Jakarta, 15 Maret 2021

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Dr. Sugiyanto, S.Pd, M.App.Sc

NIP. 196607221989031002